

**IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI SISTEM AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PELAPORAN PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA
BAPPEDA TANJUNG BALAI)**

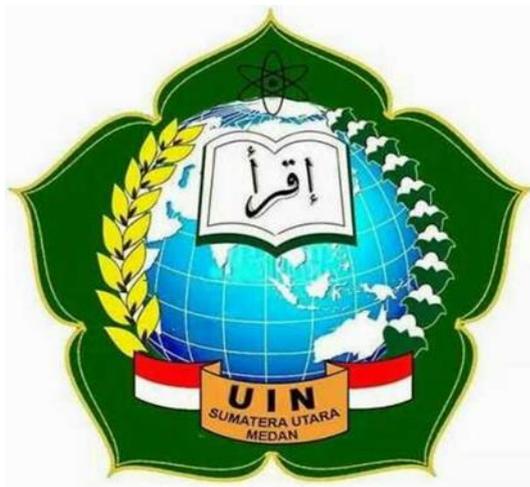
SKRIPSI

Oleh:

HASTIA SIMANJUNTAK

NIM. 0502172375

**PROGRAM STUDI
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

2021

**IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI SISTEM AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PELAPORAN PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA
BAPPEDA TANJUNG BALAI)**

SKRIPSI

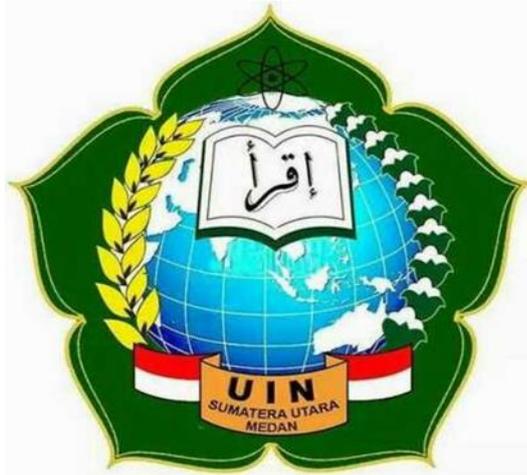
*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*

Oleh:

HASTIA SIMANJUNTAK

NIM. 0502172375

**PROGRAM STUDI
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hastia Simanjuntak
NIM : 0502172375
Tempat/Tgl. Lahir : Sei Kepayang Kiri, 19 Juni 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jalan Bahagia LK V, Kel Keramat Kubah, Kec Sei
Tualang Raso, Tanjung Balai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA BAPPEDA TANJUNG BALAI).”** Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 03 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



Hastia Simanjuntak

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI SISTEM AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PELAPORAN PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA BAPPEDA
TANJUNG BALAI)**

Oleh:

Hastia Simanjuntak

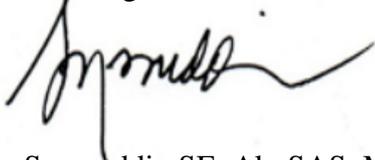
Nim: 0502172375

Dapat Disetujui Dengan Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)

Pada Jurusan Akuntansi Syariah

Medan

Pembimbing I



Dr. Saparuddin SE., Ak., SAS., M. Ag

NIDN : 2018076301

Pembimbing II



Reni Ria Armayani. M.E.I

NIDN: 2007098804

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati, MA

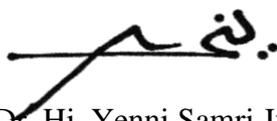
NIDN : 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan (Studi Kasus pada BAPPEDA Tanjung Balai)**” an. Hastia Simanjuntak, NIM. 0502172375 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 03 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

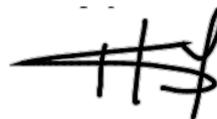
Medan, 03 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua



Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, M.A
NIDN. 2001077903

Sekretaris



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

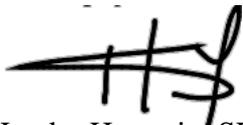
Anggota



1. Dr. Sapparuddin, SE, Ak, SAS, M.Ag
M.E.I
NIDN. 2018076301



2. Reni Ria Arymayani Hasibuan,
NIDN. 2007098804



3. Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302



4. Kusmilawaty, SE, Ak, M.Ak
NIDN. 2014068001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Hastia Simanjuntak. NIM: 0502172375. Judul Skripsi: Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan (Studi Kasus pada BAPPEDA Tanjung Balai). Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Saparuddin Siregar., SE., A.k., SAS., M.Ag dan Pembimbing Skripsi II Ibu Reni Armayani Hasibuan. M.E.I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana penerapan dan optimalisasi sistem akuntansi akruaI sudah meningkatkan kualitas pelaporan pemerintah khususnya pada Bapeda Tanjung Barai. Kepentingan penelitian yang dilakukan bersifat teoritis dan praktis. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan fenomenologis. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif dan sumber data primer dan sekunder. Metode data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan memakai wawancara dan dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kualitas interaksi Bapeda Tanjung Balai sudah sesuai dengan menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini ditopang oleh semangat BAPPEDA Tanjung Balai untuk menerapkan dan mengoptimalkan sistem akuntansi akruaI untuk mempertinggi kualitas laporan pemerintah yang diperoleh penulis selama penelitian, dan beberapa lebih jelasnya penggunaan sistem tersebut didukung dengan aturan yang baik. Namun, departemen sumber daya manusia BAPPEDA Tanjung Balai belum sepenuhnya tahu sistem akuntansi akruaI yang diperkenalkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemerintahan, AkruaI Basis, Kualitas Pelaporan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Saw semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillah tak lupa terucap rasa syukur yang besar kepada Allah SWT yang telah membantu dan mengizinkan penulis menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA BAPPEDA TANJUNG BALAI)”** dengan lancar.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Selama proses penyusunan skripsi, penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih khususnya yang istimewa kepada orangtua saya yang sangat saya cintai Ayahanda Junaidi Simanjuntak dan Ibunda Inur Panjaitan yang selalu ada disetiap kondisi apapun dan tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dan nasihat serta semangat yang tulus hingga saat ini, serta yang paling istimewa Almarhum Ibunda saya Nurliana Sitorus. Kemudian terimakasih kepada abangda terkeren saya Rinaldi Simanjuntak, S.T, kakak ipar saya yang cantik Melan Sari, kakak sekaligus sahabat terbaik Selvia Simanjuntak, S.M dan adik-adik tersayang saya Haryadi Simanjuntak dan Aulia Simanjuntak yang telah memberikan doa dan semangat serta dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada:

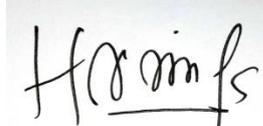
1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah;
4. Bapak Hendra Harmain, M. Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah;
5. Ibu Rahmi Syahriza, S.TH.I. M.A selaku dosen Penasehat Akademik penulis telah berkenan membimbing dan membantu selama masa perkuliahan;
6. Bapak Dr.Saparuddin Siregar, S.E., A.k., SAS., M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu dan istirahatnya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh Bapak Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Kepada BAPPEDA Tanjung Balai yang telah memberikan penulis data dan bersedia diwawancara untuk bahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diriku sendiri yang setiap detiknya selalu kembali semangat, karena another chapter on my life will soon begin. I'd like to express my biggest gratitude to those who helped me along the way, especially to Allah SWT.
11. Kepada Seluruh Keluarga penulis yang telah mendukung dan suport penulis dari awal sampai akhir perkuliahan dan sampai di tahap ini.
12. Sahabat-sahabat penulis Nuraina Izzatin yang dari awal perkuliahan sampai selesai perkuliahan sangat membantu penulis, Risma Maulida, Niza Hunaidia, Mayawi yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terimakasih kepada Iki, Eva, Yona, Lia, Reza, Hafzhan, Irfan teman terbaik penulis dalam hal memotivasi, merepotkan dan direpotkan, dan juga partner terbaik self healing penulis Asrul dan Jundi. Semoga kedepannya kita selalu melakukan yang terbaik.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan pengejar toga dan gelar S1 khususnya keluarga besar Akuntansi Syariah kelas E Stambuk 2017. Semoga Allah permudah jalan kita semua dalam meraih cita-cita.
15. Terimakasih kepada keluarga besar organisasi ku yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Syariah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FEBI UINSU, maupun organisasi Relawan yang saya ikuti selama masa perkuliahan saya.
16. Dan juga terimakasih banyak terkhusus untuk teman yang paling jauh dimata.
17. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga bantuan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis dapat dibalas oleh Allah SWT berupa limpahan pahala dan kebaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, 03 Agustus 2021

Penulis



Haastia Simanjuntak

NIM. 0502172375

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Batasan Istilah	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Sistem Akuntansi Pemerintahan	9
2. Teori Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Di Pemerintahan	15
a. Teori Stewardship	15
b. Teori Keagenan	16
c. Teori Stakeholder	19
3. Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintahan	21
4. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintahan	24
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Teoritis	31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Metode Analisis Data	36
F. Tahapan Analisis Data	36

BAB IV : HASIL

A. Temuan Penelitian	38
1. Gambaran Umum BAPPEDA Tanjung Balai	38
2. Struktur Organisasi	38
B. Pembahasan	52
1. Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI di BAPPEDA Tanjung Balai	52
2. Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI di BAPPEDA Tanjung Balai	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Perbandingan Komponen Laporan Keuangan Antara Basis Kas Menuju Akrual & Basis Akrual	57
Tabel 4.2 Rician Beban Pegawai Tahun 2019 dan 2020	60
Tabel 4.3 Rincian Beban Operasi Tahun 2019 dan 2018	62
Tabel 4.4 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2019	63
Tabel 4.5 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2020	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, akuntansi pemerintahan secara historis belum banyak tumbuh semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bagi catatan sejarah, produk akuntansi pemerintahan Indonesia awal merupakan neraca kekayaan negeri yang dikeluarkan pada tahun 1948. Wujud akuntabilitas keuangan ini masih dalam bahasa serta mata duit Belanda.

Sejak masa reformasi diawali pada tahun 1998, bangsa Indonesia sudah selangkah lebih maju lagi mengarah masa keterbukaan. Dalam masa keterbukaan ini, warga terus menjadi menyadari hak serta kewajibannya selaku masyarakat negeri serta lebih bisa mengantarkan aspirasi yang tumbuh yang salah satunya revisi terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan- badan pemerintah. Pengelolaan keuangan wilayah ialah salah satu bagian yang hadapi pergantian mendasar dengan ditetapkannya UU Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah serta UU Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Wilayah. Kedua Undang-Undang tersebut sudah membagikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah wilayah. Kewenangan yang diartikan antara lain merupakan keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, memastikan arah, tujuan serta sasaran pemakaian anggaran.

Serta merambah pada masa reformasi pula, warga di sebagian besar daerah Indonesia, baik di provinsi, kota ataupun kabupaten mulai mangulas laporan pertanggungjawaban kepala wilayah tiap- tiap dengan lebih seksama. Perihal tersebut sebab sebagian kali terjalin ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala wilayah dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik ataupun pemakaian anggaran belanja wilayah. Memandang pengalaman di negara- negara maju, nyatanya dalam penerapannya, keingintahuan warga tentang akuntabilitas pemerintahan tidak bisa dipadati cuma oleh data keuangan saja. Warga ingin

mengetahui lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya sudah beroperasi dengan efektif serta efisien.

Reformasi bidang akuntansi pemerintahan diisyarati dengan terbitnya PP Nomor. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Wilayah. Sehabis dikeluarkannya paket Undang- Undang Keuangan Negeri ialah UU Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negeri, UU Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negeri, UU Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pengecekan Pengelolaan serta Tanggungjawab Keuangan Negeri, hingga data keuangan Negeri yang meliputi Pemerintah Pusat serta Pemerintah Wilayah wajib dilengkapi dengan data Laporan Realisasi APBN/ APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah berikutnya wajib mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah semacam yang tertuang dalam PP 24 tahun 2005 ditambah lagi dengan terbitnya Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006. Permendagri Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Wilayah, menimbulkan tuntutan menimpa perlunya uraian teoritis serta instan pada akuntansi keuangan wilayah serta standar akuntansi pemerintah, selaku kunci dari pengelolaan keuangan wilayah yang sehat.¹

Perkembangan bidang akuntansi pemerintahan ditandai dengan menggunakan terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, PP No. 71 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh wajib diterapkan pada tahun anggaran 2015.² Pada tahun 2015 merupakan tahun yang sangat penting di bidang pelaporan keuangan pemerintahan, baik pemerintahan pusat juga pemerintahan wilayah. Tidak terkecuali di semua pemerintah Sumatera Utara. Hal itu karena di tahun 2015 terjadi perubahan basis akuntansi, dari yang sebelumnya menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi menggunakan sistem

¹ Afiah N. N, (2009). “ *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi keuangan pemerintah Daerah* ” . Edisi Pertama Cetakan Ke-1, Penerbit Prenada Media Group Jakarta.

²Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual”.

akuntansi berbasis akrual (akrual basis), dan kemudian Permendagri Tahun 2016 mengenai panduan penyusunan aturan pendapatan dan belanja daerah tahun aturan 2017.³

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan serta lembaga- lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Dalam kaitannya dalam keuangan negara pemerintah berkewajiban buat melakukan pengelolaan keuangan negeri secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif, efisien, serta transparan, dengan mencermati rasa keadilan serta kepatutan. Buat menggapai tujuan tersebut, sebagian tahun terakhir yang kemudian pemerintah berupaya buat mencari basis akuntansi yang pas supaya bisa diterapkan dalam akuntansi pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah standar yang harus diikuti oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam laporan keuangannya. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi pedoman untuk menyatukan pandangan antara penyusun, pengguna, dan auditor (BPK). SAP ditentukan oleh nomor PP. 24 Tahun 2004 dan SAP harus digunakan untuk menyusun laporan keuangan tahun buku 2005. SAP adalah persyaratan yang mengikat secara hukum yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia. Pemerintah kemudian mendelegasikan tugas penyusunan standar tersebut kepada komite standar independen, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Badan Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi

³Republik Indonesia, “Permendagri No 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017”.

yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.⁴

Standar akuntansi pemerintah disyaratkan oleh undang-undang. Pada tahun 2010, standar akuntansi pemerintah No 71 menetapkan bahwa semua entitas pelapor dan entitas akuntansi pemerintah pusat harus mengadopsi sistem akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Akuntansi akrual adalah dasar akuntansi untuk konfirmasi, pencatatan dan penyajian dalam laporan keuangan ketika transaksi ekonomi dan peristiwa lain terjadi, terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam laporan akuntansi akrual, waktu pencatatan konsisten dengan waktu terjadinya aliran sumber daya, karena semua aliran sumber daya dicatat, informasi yang paling komprehensif dapat diberikan.

Sebagai salah satu agenda reformasi keuangan Indonesia, diharapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual akan mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik secara lebih sistematis, serta tantangan era globalisasi saat ini, yaitu persyaratan akuntansi pemerintahan untuk administrasi pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi. Untuk itu diperlukan aparatur pemerintah yang dapat menerapkannya dalam praktik, namun mengubah sistem akuntansi tidaklah mudah. Setiap perubahan membutuhkan tahapan yang panjang dan melelahkan, perubahan membutuhkan penyediaan infrastruktur fisik, regulasi pendukung, sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi, dan yang terpenting adalah kemauan dan dukungan pimpinan untuk mengawasi proses perubahan ini.

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh IFAC Publik Sector Committee dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan

⁴Indra Franselski Sampel, dkk. "Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual". Jurnal EMBA. Vol. 3 No. 1 Maret 2015, hal. 621-630.

kemampuan pendanaanya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.⁵ Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Penerapan dan mengoptimalkan SAP berbasis akrual di BAPPEDA harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja tinggi agar menghasilkan laporan yang akurat dan terpercaya. Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi. Menurut Robbins dalam (Pristiani 2015) kinerja sebagai fungsi hasil interaksi antara kemampuan dan motivasi. Jadi kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya akan lebih mudah tercapai jika kinerja karyawannya baik.⁶

Salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas rendah, jika sumber daya manusia yang banyak dapat dimanfaatkan secara efektif akan sangat membantu mendukung pembangunan negara yang berkelanjutan. Beberapa hal terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual di daerah harus disiapkan, yakni ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi pengelola kerja (SOTK) (SKPD) satuan kerja perangkat daerah. dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Ketika Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis sistem akrual diterapkan sepenuhnya, fungsi akuntansi masing-masing PPKD dan SKPD harus maksimal. Setiap organisasi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah perlu menata sumber daya manusia agar organisasi tersebut dapat beroperasi secara sistematis dan efisien.

Dalam rangka penyempurnaan sistem akuntansi akrual untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti kemampuan sumber daya manusia, teknologi, peran

⁵IFAC Public Sector Committee “Kementerian Keuangan Republik Indonesia”, Tahun 2014.

⁶Pristiani. “Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Berbasis Akrual Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Jabatan”, Jurnal Universitas Negeri Semarang. Vol.3 No. 1 Tahun 2015, hal. 1-10.

PPK-SKPD, dan sistem pengendalian intern. Menurut hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, salah satu penyebab sistem akuntansi akrual BAPPEDA Tanjung Balai tidak dapat beroperasi secara efektif adalah kurangnya sumber daya manusia untuk memahami sistem tersebut. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas dan efisiensi laporan yang disampaikan oleh SDM BAPPEDA Tanjung Balai.

Oleh karena itu, BAPPEDA Kota Tanjung Balai terus mengevaluasi sumber daya di lingkungan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi laporan pemerintah, sehingga membuat penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan (Studi Kasus Pada BAPPEDA Tanjung Balai)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pada BAPPEDA Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan?
2. Apakah BAPPEDA Tanjung Balai sudah mengoptimalkan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan di BAPPEDA Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan di BAPPEDA Tanjung Balai.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini harus menjadi acuan dan penilaian bagi karyawan untuk lebih mengoptimalkan perannya. Kajian ini dapat menjadi sumber informasi tentang implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi akrual Tanjung Balai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tanjung Balai.

2. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat dari perkuliahan dengan prakteknya di lapangan mengenai sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan pelaporan keuangan pemerintah, dan juga sebagai salah satu syarat bagi penulis agar dapat meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bagi Pihak Lainnya

Survei ini harus menjadi acuan dan penilaian bagi karyawan untuk lebih mengoptimalkan perannya. Kajian ini dapat menjadi sumber informasi tentang implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi akrual Tanjung Balai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tanjung Balai.

D. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016).
2. Akuntansi Pemerintahan yaitu sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Bachtiar Arif dkk, 2002;3).
3. Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (bukan hanya pada saat kas yang diterima atau dibayar). (Abdul Halim,2007;49)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

3. Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan luar organisasi. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 238/PMK.05.2011 adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.⁷

Organisasi pemerintah dibebaskan merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang di harapkan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus di tujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi harus menyusun sistem akuntansi pemerintahannya, yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana yang telah di tetapkan SAP. Jadi SAP sudah menjadi rujukan dalam menyusun sistem akuntansi pemerintah untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan SAP. Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dalam Ketentuan Penutup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Standar Akuntansi Pemerintah yang digunakan saat ini oleh instansi pemerintah sudah diperjelas dalam peraturan No

⁷ Manoosoh, Hendrik. *"Dalam Mewujudkan Good Government Governance Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara"*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15 No. 07 Tahun 2015, hal. 778

24, SAP mengatur tentang penyajian laporan keuangan. PP No 24 tahun 2005 adalah SAP berbasis kas menuju akrual, dimana SAP mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Dan selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas.⁸

Akuntansi beebasis akrual adalah suatu basisi akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui dan dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 282:⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ إِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ءَمُومًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا

⁸ Zeyn. E, (2011). "Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi". Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, ISSN:2088-0685 Vol.1. No.1. April 2011, hal. 21-37.

⁹ Q,S Al Baqarah (2): 282.

أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . (٢٨٢)

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 282)

Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman jika melakukan transaksi hutang piutang sampai waktu tempo tertentu, maka harus melakukan pencatatan untuk menjaga harta orang lain dan dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari. Transparansi ini sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanah dari rakyat, yang berbeda dengan ayat yang berbeda dengan ayat yang berbeda dengan ayat yang berbeda dengan ayat yang berbeda dengan kebohongan yang sulit untuk disembunyikan dengan transparansi.. Sehingga transparansi menjadi instrumen yang penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan melakukan korupsi.

Pemerintah yang baik akan transparan dan akuntabel terhadap rakyat, baik tingkat pusat maupun daerah, dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti.¹⁰

Penerapan akuntansi berbasis akrual adalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga kinerja-linerja para aparatur bisa terukur.. Hal ini, tujuab pembangunan untuk memakmurkan rakyat dapat tercapai dengan efisiensi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan bisa mendorong terwujudnya good corporate governance sehingga tujuan pembangunan untuk memskamurkan rakyat dapat tercapai.

Standard akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia.¹¹

¹⁰ Rosyada dan Ayu Amrina, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda", *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2016, hal. 102-114.

¹¹ Lamonisi dan Sony, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon", *Vol. 4 No. 1 Tahun 2016*, hal.223-230.

Sehingga dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan pihak yang penting, sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Tujuan dari penggunaan basis akrual yaitu:¹²

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (panganggaran, akuntansi dan pelaporan)
- b. Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah
- d. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan
- e. Mereformasi sistem anggaran belanja
- f. Transfaransi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam sistem akuntansi keuangan daerah adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia-Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (IAI-KSAP) pada tahun 2002 telah memilih basis akrual sebagai dasar pencatatan akuntansi. Basis akrual mengakui transaksi dan kejadian pada saat transaksi itu terjadi, yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajiban meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya. Dan dengan basis akrual, organisasi akan mengakui adanya utang, piutang, dan aset.¹³

Pembuatan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang adalah kondisi pendukung adanya akuntabilitas berupa

¹² Margareta dan Weda Ayu, "Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual", Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 9 Tahun 2015, hal. 1-5.

¹³ IAI-KSAP, 2002.

keterbukaan pemerintah atas kegiatan pengelolaan asal daya publik. Dan transparansi informasi wajib dilakukan pada bentuk yang relevan dan gampang dipahami. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah baku yang wajib diikuti pada laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Indonesia penerapan basis akrual wajib dilaksanakan oleh seluruh organisasi sektor menjadi entitas pelaporan. Organisasi sektor publik adalah semua instansi negara baik pemerintah sentra juga pemerintah wilayah yang didanai menurut dana publik, termasuk juga antara lain kementerian keuangan yang juga adalah perangkat pemerintah sentra.

Selain itu diharapkan adanya upaya pengharmonisan atau penyempurnaan berbagai aturan pada berbagai pertauran pada berbagai organisasi sektor publik baik organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan sistem akuntansi pemerintah. Selanjutnya, satuan kerja mengelola pendanaan yang secara desentralisasi harus bersama dengan unit-unit kerja lain dibawahnya. Karena dana yang diberikan kepada satuan kerja adalah dana dari pemerintah, maka setiap satuan kerja harus menggunakan dan mempertanggungjawabkan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.¹⁴

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual menaruh fakta pada penerimaan dan pembayaran kas namun pula kewajiban pembayaran kas yang akan diterima pada masa yang akan datang. Pada sektor publik, keputusan tidak hanya ditentukan pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial misalnya pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah dan hadiah donasi acara pada grup-grup warga eksklusif sangat tergantung pada pertimbangan ekonomi pemerintah.

4. Teori Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintahan

a. Teori Stewardship

Teori *stewardship* adalah alternatif teori keagenan dan menawarkan prediksi yang berlawanan mengenai penataan jalan efektif. Teori *stewardship*

¹⁴Asfiansyah, Ahdony, "Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah", Jurnal Neo-Bis. Vol. 9 No. 1 Tahun 2015, hal.1-5.

mendeskrripsikan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi dari tujuan-tujuan individu namun lebih ditujukan dalam target output primer mereka buat kepentingan organisasi. Teori tadi mengemukakan bahwa interaksi yang bertenaga antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori *stewardship* dibangun atas perkiraan filosofis tentang sifat insan, bahwa insan dalam hakekatnya bisa dipercaya, bisa bertindak menggunakan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.¹⁵

Teori *stewardship* mengakui berbagai motif non keuangan untuk perilaku manajerial. Ini termasuk dalam kebutuhan akan prestasi dan pengakuan kepuasan intrinsik atau kinerja yang sukses, penghormatan terhadap otoritas dan etika kerja. Manajer dipandang tertarik untuk mencapai kinerja yang tinggi dan mampu menggunakan kinerja tinggi dan mampu menggunakan tingkat diskresi yang tinggi untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham. Dan pada dasarnya mereka adalah pelayan aset perusahaan yang baik dan setia kepada perusahaan. Teori *stewardship* menyatakan bahwa seorang manajer ketika dihadapkan pada suatu tindakan yang dipandang tidak menguntungkan secara pribadi dan dapat dipatuhi berdasarkan rasa tanggung jawab dan identifikasi dengan organisasi.¹⁶

Teori *stewardship* bisa diimplementasikan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik dan akuntansi pemerintahan misalnya organisasi pemerintah pada BAPPEDA Tanjung Balai. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual diterapkan buat mengoptimalkandan memenuhi kebutuhan pengguna keterangan laporan keuangan. Laporan keuangan yang tersaji menggunakan dengan berpedoman dalam baku yang diterapkan lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas adalah bagian yang berperan krusial pada kepuasan publik atas pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas membutuhkan kinerja yang baik

¹⁵ Zoelisty. 2014. "*Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Masjid*", Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, 2014), hal. 20.

¹⁶ Muth, M. M., dan Donaldson, L. 1998. *Stewardship Theory and Board Structure: a Contingency Approach. Corporate Governance: An International Review*, 61, 5–28.

menurut aparatur-aparatur pemerintah termasuk pada BAPPEDA Tanjung Balai. Oleh karenanya buat memenuhi cita-cita dan kepuasan publik dan aparatur- aparatur negara wajib memperhatikan kinerja terutama pada pengelolaan keuangan.

b. Teori Keagenan

Teori keagenan menyebutkan hubungan antara pemegang saham menjadi prinsipal dan manajemen menjadi agen. Dimana manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham buat bekerja, demi mencapai kepentingan pemegang saham. Pada dasarnya pada informasi ekonomi, teori agensi telah berkembang sebagai dua bagian yaitu *positivixt* dan *principal agent*. Bagian-bagian tadi memiliki bagian analisis yang sama tentang orang-orang, organisasi dan informasi. Meskipun begitu mereka pula mempunyai disparitas pada kelakuan matematis, variabel dependen dan gaya.

Agen yaitu manajemen perusahaan, sedangkan *principal* yaitu pemilik (pemegang saham). Teori keagenan memaparkan adanya pemisahan hak milik perusahaan dan pertanggungjawaban atas pembuatan keputusan. Hubungan keagenan selalu mengakibatkan adanya perseteruan antara pemilik dan agen lantaran terjadinya pola pikir dan disparitas kepentingan yang menonjol. Mekanisme yang sempurna buat mengurangi kasus keagenan merupakan menggunakan adanya kepemilikan manajerial.¹⁷

Konsep-konsep teori keagenan pada latarbelakangi oleh aneka macam teori sebelumnya, misalnya teori konsep biaya transaksi, teori *property right* dan filsafat utilitarisme. Teori keagenan dibangun menjadi upaya buat tahu dan memecahkan kasus yang ada manakala terdapat ketidaklengkapan informasi dalam waktu melakukan kontrak (perikatan).¹⁸ Teori ini bermula berdasarkan bagian teori ekonomi. Teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi.

¹⁷ Jensen, M. 1983. *Organizational theory and methodology*. *Accounting Review*. Vol.56. No.3.

¹⁸ Setiawan, Wahyu. "Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia", Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), hal . 32

Berdasarkan hal tersebut akuntansi mempunyai peranan yang penting, khususnya menjadi indera pertanggungjawaban pada interaksi antara principal selaku pemberi amanah dan kekuasaan pada agen buat melaukan pekerjaan yang berkaitan menggunakan kepentingan principal. Teori ini membahas mengenai interaksi keagenan, dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan pada pihak lain (agen) yang melakukan pekerjaan. Teori agen memandang bahwa pihak lain tidak dapat dipercaya buat bertindak menggunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal.

Secara generik teori ini mengasumsikan bahwa principal bersikap netral terhadap resiko, sementara agen bersikap menolak bisnis dan risiko. Kedua pihak tadi diasumsikan termotivasi oleh kepentingannya sendiri, dan seringkali kepentingan diantara keduanya berbenturan. Teori keagenan berusaha untuk menjawab kasus keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama dan mempunyai tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.¹⁹

Penggunaan akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan akutabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen kepada principal. Sebagaiman dalam firman Allah dalam Qs An-Nisa ayat 58:²⁰

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS An-Nisa: 58).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan hambanya buat mengungkapkan amanat secara sempurna, utuh dan tanpa mengulur-ulur atau menunda-nundanya pada orang yang berhak mendapat amanat tersebut. Dalam hal

¹⁹ Lubis, Arfan Ikhsan, *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2, Jakarta: Salemba 4, 2014.

²⁰ Q.S An Nisa (4) 58.

ini, Allah memrintahkan supaya seorang memegang amanat berupa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Amanat merupakan waktu kita menanggung sesuatu yang sebagai milik orang lain dan kita bertanggung jawab mengembalikan hal tersebut.

Prinsip bisnis Islam nabi Muhammad SAW mempunyai sifat-sifat yang baik yang bisa dijadikan pedoman untuk dilakukan, seperti:

1. Shiddik (benar dan jujur) adalah sifat nabi Muhammad SAW yang berarti benar dan jujur.
2. Amanah (terpercaya) artinya dapat dipercaya dan bertanggungjawab.
3. Fathanah (cerdas) dapat diartikan sebagai intelektual dan kecerdikan.
4. Thabligh (komunikatif) yaitu orang yang memiliki sifat tabligh, akan menyampaikan dengan benar dan dengan tuur kata yang tepat.

Dalam konteks organisasi sektor publik, pengertian akuntabilitas menjadi kewajiban pemegang amanah (pemerintah) buat menaruh pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan membicarakan segala kegiatan dan aktivitas yang sebagai tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak buat meminta oertanggungjawaban tersebut.²¹ Tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual dalam satuan kerja bisa sebagai tolak ukur dari pertanggungjawaban satuan kerja menjadi agen pada masyarakat menjadi prinsipal.

Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah, demi kepentingan kesejahteraan para aparatur dan rakyat luas.

c. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* membicarakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi buat kepentingannya sendiri, tetapi wajib menaruh manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditur, konsumen, sup;ier, pemerintah,

²¹ Chairunnisa, Darwanis dan Sephi, “*Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*”, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 6 No. 2 Tahun 2013, hal. 150-174.

masyarakat, analis & pihak lainnya). Dengan demikian, eksistensi suatu perusahaan sangat ditentukan oleh dukungan yang diberikan oleh para *stakeholder* pada perusahaan tersebut.

Organisasi harus peduli wajib peduli menggunakan kepentingan *stakeholder* saat menciptakan keputusan strategis. Meskipun setiap peneliti mendefinisikan tidak sama mengenai teori *stakeholder*, prinsip nya sama yaitu perusahaan atau organisasi usaha wajib mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan dan imbas menurut orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau ditentukan oleh kebijakan dan operasi.²²

Teori *stakeholder* memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:²³

1. Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang bertanggungjawab secara sosial.
2. Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan.
3. Menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik.
4. Kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah go publik menjadi lebih baik

Teori *stakeholder* umumnya adalah teori bagi perusahaan sektor swasta. Akan tetapi, dalam kenyataannya sudut pandang teori ini bisa diterapkan dalam sektor publik, & sebagian juga diterapkan pada konteks keputusan manajerial pada pemerintahan. *Stakeholder* administrasi lokal,²⁴ yaitu:

1. Masyarakat
2. Bisnis

²² Mainardes, *Pengaruh Stakeholder Engagement Terhadap Pengungkapan Sustainability report*, 2011.

²³ Farida Efriyanti, et. al., "Analisis Perbandingan Pengungkapan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia" *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 3, No. 2, September 2012, hal. 267-280.

²⁴ Sukmaningrum, Tantriani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 2012.

3. Administrasi publik lain
4. Politisi
5. Parlemen dan lembaga peradilan
6. Media
7. Pihak luar negeri
8. Tenaga kerja

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa kualitas kabar yg tersaji pada laporan keuangan ditentukan sang kiprah *stakeholder* & mempegaruhi *stakeholder* pula. Dalam Alquran, bahwa Islam mengajarkan pada umatnya bahwa kinerja wajib dinilai, seperti dalam ayat At-Taubah 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

Terjemahan:

Dan katakanlah :Bekerjalah kau, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat oekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan ke pada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Qs. At-taubah: 105)

²⁵Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Katakan pada manusia, wahai Rasulullah, "Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah dan orang-orang Mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbanginya menggunakan timbangan keimanan dan bersaksi menggunakan perbuatan- perbuatan itu. Kemudian sesudah mati, kalian akan di kembalikan pada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin kalian, lalu mengganjar menggunakan perbuatan.

²⁵ Q.s At-Taubah (9): 105

3. Implementasi Dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Di Pemerintahan

Akuntansi berbasis akrual sangat krusial pada akuntansi lantaran memilih opini atau perkiraan yang akan digunakan pada saat melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Implementasi akuntansi berbasis akrual adalah penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan mempedomani lampiran I PP No. 71 tahun 2010 mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah dimensi yang dipakai yaitu:

- a. Dimensi pengakuan pendapatan yang diukur berdasarkan pengakuan pendapatan pada laporan operasional dan pengakuan pada laporan realisasi anggaran.
- b. Dimensi pengakuan beban dan belanja yang diukur berdasarkan pengakuan beban dan pengakuan belanja.
- c. Dimensi akuntansi persediaan yang diukur dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan.
- d. Dimensi akuntansi aset tetap yang diukur dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan serta depresiasi.
- e. Dimensi akuntansi kewajiban yang ini diukur dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kewajiban.
- f. Dimensi laporan operasional yang diukur dengan penyajian laporan operasional.
- g. Dimensi laporan perubahan ekuitas yang diukur dengan penyajian laporan perubahan ekuitas.²⁶

Implementasi Peraturan Pemerintah angka 71 tahun 2012 mengenai SAP, dimana masih ada perubahan metode pencatatan yang semula berbasis kas menuju akrual sebagai pencatatan yang berbasis akrual memanglah tidak semudah yang diperkirakan. Penerapan akuntansi berbasis akrual wajib dibuat secara hati-hati, mengingat Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual baru saja

²⁶Najati, Ida, 2016. "Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua: Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga", Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 14No.1 Tahun 2016, hal. 1-15.

diterbitkan dan belum pada implementasikan sepenuhnya. Baik oleh pemerintah sentra juga maupun pemerintah wilayah.

Tantangan yang dialami pada implementasi akuntansi pemerintah berbasis kas salah satunya wajib mempunyai asal daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan. Keberhasilan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dalam pemerintah wilayah ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya taraf pendidikan staff, pembinaan yang diberikan juga faktor situasional lainnya msalnya pengalaman satuan kerja pada menjalankan akuntansi berbasis kas menuju akrual, dan juga berukuran satuan kerja tersebut.²⁷

Pada penerapan SAP berbasis kas menuju akrual, banyak hambatan yang dijumpai misalnya seperti yang dijelaskan diparagraf diatas, lantaran kurang pahamnya staf pada menyusun laporan keuangan. Kondisi yang demikian mejadi hal ironis, pemerintah pusat mengharuskan beralih penerapan ke SAP berbasis akrual. Secara sederhana, penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk menaruh data yang lebih akurat. Tujuannya untuk memberikan informasi atau kabar yang lebih transparan mengenai biaya pemerinah dan menaikkan tingkat kualitas pengambilan keputusan didalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas dan tidak sekadar basis kas.

Dalam UU No. 1 tahun 2004 dinyatakan bahwa “Dalam rangka menaikkan kinerja, transparansi & akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku ketua pemerintah mengatur & menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada lingkungan pemerintah secara menyeluruh”. Implementasi akuntansi berbasis akrual pula bisa membawa pengaruh dalam penurunan kualitas laporan keuangan yg didapatkan sang entitas pelaporan jika implementasi tidak dilakukan menggunakan baik.

²⁷Kusuma dan Muhamad Indra Yudha, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah*”, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 2 No. 1 Tahun 2013, hal. 5-20.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis, diantaranya :

1. Kondisi lingkungan
2. Hubungan antar organisasi
3. Sumber daya organisasi
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana²⁸

Implementasi akuntansi berbasis akrual juga mampu membawa pengaruh pada penurunan kualitas laporan keuangan yg didapatkan sang entitas pelaporan, bila implementasi tidak dilakukan menggunakan baik. Penerapan akuntansi berbasis akrual memang tidaklah gampang sebagai akibatnya kemungkinan hambatan & kendala akan terjadi. Namun, disiniah perlu persiapan yang baik dan mempersiapkan planning yang matang, yang bisa dijadikan pegangan andai kata terjadi hambatan pada pelaksana akuntansi berbasis akrual, sebagai akibatnya tidak berdampak dalam penurunan kualitas pelaporan keuangan. Penggunaan basis akrual adalah keliru satu karakteristik menurut praktik manajemen keuangan terbaru atau dianggap sektor publik yg bertujuan buat menaruh fakta yg lebih transparan tentang porto pemerintah & mempertinggi kualitas pengambilan keputusan pada pemerintah menggunakan memakai fakta yang diperluas nir sekadar basis kas. Laporan keuangan yg tersaji pada basis akrual akan memungkinkan pengguna laporan keuangan buat:

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan semua asal daya suatu entitas
2. Menilai kinerja, posisi keuangan & arus kas menurut suatu entitas
3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan asal daya pada atau melakukan usaha menggunakan suatu entitas Tujuan primer sektor publik & sektor partikelir merupakan tidak selaras.

Tujuan pengaplikasian basis akrual pada sektor publik dalam dasarnya merupakan buat mengetahui besarnya biaya yang diperlukan buat membentuk

²⁸Dewi, Annasia Sophia, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E Government*, 2013.

pelayanan publik dan penentuan harga pelayanan yang dibebankan pada publik. Hal ini tidak selaras menggunakan tujuan pengaplikasian basis akrual pada sektor publik yang dipakai buat mengetahui & membandingkan besarnya biaya masih ada pendapatan. Perbedaan ini ditimbulkan lantaran sektor partikelir lebih memfokuskan dalam bisnis buat emaksimumkan laba. Sedangkan sektor publik difokuskan dalam optimalisasi pelayanan publik.

Dampak positif menurut penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah banyak diakui sang para peneliti. Akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual secara signifikan menaruh donasi pada menaikkan kualitas pengambilan keputusan buat efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui kabar keuangan yg seksama dan transparan dan pula menaikkan alokasi asal daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang disebabkan menurut suatu kebijakan dan transparansi menurut keberhasilan suatu program.²⁹

4. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintahan

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan & teknologi sudah mencapai taraf tinggi, sebagai akibatnya tuntutan terhadap kinerja aparaturpemerintah semakin besar. Terutama tentang minimnya dan kurang optimalnya taraf produktivitas kerja para aparatur pemerintahan, maka penekanan terhadap peningkatan kualitas asal daya insan sebagai topik krusial pada bicarakan. Hal ini didasari pemikiran bahwa menggunakan adanya asal daya insan yang berkualitas maka produktivitas kerja akan semakin meningkat. Sehingga aparatur pemerintah akan sanggup menjalankan tugas-tugas menggunakan baik, pula menaruh donasi yang aporisma pada menaruh pelayanan terhadap warga pada pelaporan keuangan termasuk pada BAPPEDA Tanjung Balai.

Didalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan wilayah dikatakan bahwa keuangan wilayah wajib dikelola secara tertib dan taat peraturan perundang-undangan, dan laporan keuangan adalah laporan yang wajib

²⁹ Lamonisi dan Sony, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon”, Jurnal Emba, Vol. 4 No.1 Tahun 2016, hal.223-230.

terstruktur tentang seluruh bagian-bagian laporan keuangan. Tujuan generik menurut laporan keuangan sendiri yaitu menyajikan kabar tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang tentu berguna bagi para pengguna pada menciptakan dan buat mengevaluasi keputusan tentang alokasi asal daya.

Dan dalam laporan keuangan memerlukan asal daya insan yang berkompoten dan berkualitas, yang mempunyai semangat tinggi dan selalu memperhatikan nilai-nilai sosial. Dengan adanya asal daya yang berkompoten dan mempunyai kualitas dan pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan wilayah. Maka diperlukan SKPD bisa menyajikan laporan keuangan menggunakan sah dan memnuhi ciri kualitatif laporan keuangan. Ada beberapa faktor yang mensugesti kualitas laporan keuangan wilayah, yaitu:

1. Kompetensi sumber daya manusia
2. Teknologi
3. Peran PPK-SKPD
4. Sistem pengendalian intern (SPI)³⁰

Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan. Pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat dilaporan keuangan pemerintah daerah harus memnuhi bebrapa karakteristik kualitatif yang sudah diisyaratkan dalam PP No. 24 tahun 3005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan jika tidak sesuai dengan PP maka akan mengakibatkan permasalahan masalah pada daerah dan akan membuat kerugian besar. yaitu:

1. Relevan, dimana informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan, atau dengan kata lain informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Dan agar

³⁰Pradono, Febrian Cahyo. *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe), Hal. 188 – 200, Thun 2015, Vol. 22, No. 2 Issn: 14123126.

informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan.

2. Andal, keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Suatu informasi dikatakan andal apabila:
 - a. Dapat di uji kebenarannya.
 - b. Netral
 - c. Peyajian secara wajar/jujur
 - d. Dapat dibandingkan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual telah banyak dilakukan, diantaranya oleh M. Dimas Satrio, Indrawati Yuhertina, Ardi Hamzah 2016³¹, Ririz Setiawati Kusuma 2013³², Warda 2016³³, Sony Lamonisi 2016³⁴, Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti 2018³⁵. Secara umum penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

³¹ M. Dimas Satrio, Indrawati Yuhertina, Ardi Hamzah. "Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang" (Jurnal Akunatnsi dan Keuangan, Vol. 18, No. 1, Mei 2016), hal 59-70.

³² Ririz Setiawati Kusuma, :Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kanupaten Jember)", Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2013.

³³ Ward, "Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan", (Skripsi Universitas Terbuka Jakarta), 2016.

³⁴ Sony Lamonisi, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Tomohon", (Jurnal Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado), 2016.

³⁵ Nikke Yusnita Mahardini, Ade Miranti, "Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015" (Jurnal Akuntansi, Vol 5 No1 Januari), 2018.

Tabel 2.1 : Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	M. Dimas Satrio, Indrawati Yuhertiana, Ardi Hamzah (2016)	Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Di Kabupaten Jombang	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Jombang dilakukan pada beberapa aspek, yaitu dalam aspek komitmen SAP berbasis akrual belum sepenuhnya di implementasikan. Dalam aspek pengelolaan SDM sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk bendahara dan pengelolaan keuangan SKPD. Dan terakhir dalam aspek teknologi informasi sudah menggunakan SIMDA yang mendukung SAP berbasis akrual bekerja sama dengan BPKP.
2	Ririz	Analisis Kesiapan	Deskriptif	Dari hasil penelitian ini,

	Setiawati Kusuma (2013)	Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)	Kualitatif	kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di kabupaten Jember dibidang SDM, kesiapan informasi dan sarana prasarana sudah sangat siap, tetapi memiliki kendala pada SAP seperti penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, dan masih kurangnya Bintek, sosialisasi, dan sarana prasarana yang belum mencukupi.
3	Warda (2016)	Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten	Deskriptif Kualitatif	Penerapan kebijakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada penelitian ini ditentukan oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap

		Nunukan		implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.
4	Sony Lamonisi (2016)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tomohon dalam mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan. Hal itu didukung dengan sudah adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk juga pemerintah Kota Tomohon dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

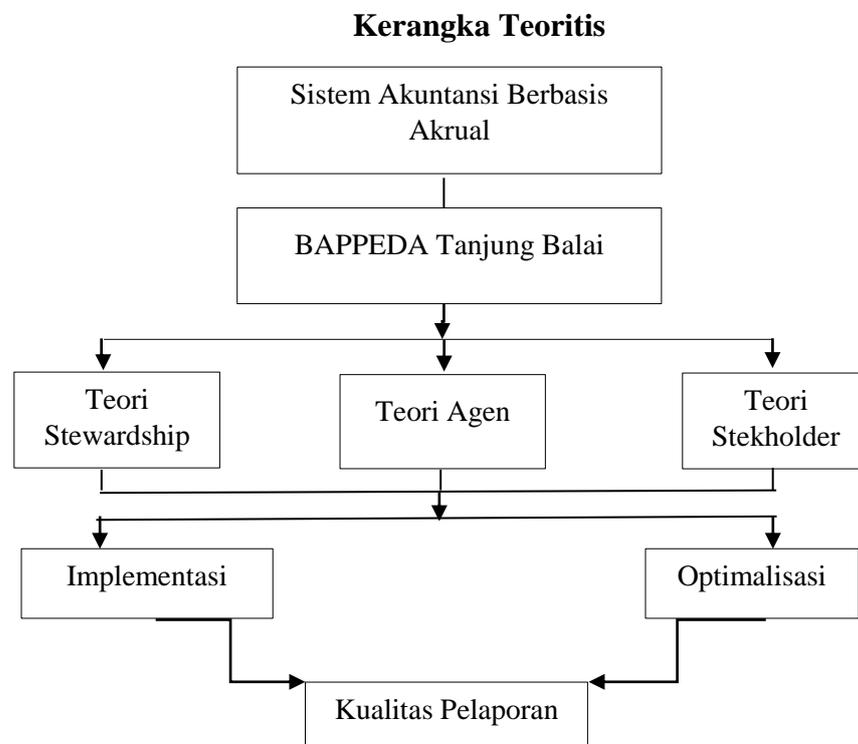
5	Nikke Yusnita Mahardini, Ade Miranti (2018)	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2015, dan kompetensi sumber daya manusia juga berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten, karena semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung semakin baik.
---	---	---	-------------	---

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini yaitu berbedanya tempat riset yang dilakukan sehingga hasil yang diperoleh juga berbeda karena hambatan-hambatan atau masalah yang dialami oleh perusahaan penelitian terdahulu dan sekarang juga berbeda. Ada beberapa penelitian yang terdahulu yang menggunakan metode penelitian serta variabel penelitian yang berbeda dengan

penelitian saat ini. Misalnya pada penelitian oleh Lamonisi tahun 2016 dengan menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitiannya meliputi penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Banten tahun anggaran 2015.

C. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusun atau digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis ingin menjelaskan tentang sistem akuntansi pemerintah berbasis akrua. Kerangka teoritis ini memberikan gambaran tentang implementasi dan optimalisasi akuntansi berbasis akrua dalam meningkatkan kualitas kerja pemerintahan dan kualitas pelaporan. Dengan

menggunakan beberapa teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual sudah diterapkan dan sudah optimal pada objek yang diteliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah kerangka berpikir penelitian yang menekankan dalam pemahaman tentang kasus-kasus pada kehidupan sosial dari syarat realitas. Penelitian kualitatif didefinisikan menjadi suatu proses yang mencoba buat menerima pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas yang terdapat pada hubungan manusia. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui mekanisme statistik atau bentuk hitungan lainnya.³⁶

Data kualitatif bisa berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh berdasarkan wawancara juga observasi. Hasil penelitian kualitatif sangat ditentukan sang pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti lantaran data tadi pada interpretasikan sang peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menduga penelitian kualitatif relatif bisa karena pengaruh berdasarkan peneliti sendiri pada analisis data.³⁷

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk tahu kenyataan mengenai apa yang dialami oleh subyek penelitian contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan menggunakan cara naratif pada bentuk istilah-istilah dan bahasa dalam suatu konteks spesifik yang alamiah dan menggunakan memanfaatkan aneka macam metode ilmiah.³⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan juga salah satu metode penelitian untuk memahami fenomena berdasarkan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah BAPPEDA Tanjung Balai sudah menerapkan dan mengoptimalkan sistem akuntansi berbasis akrual dalam pelaporannya.

³⁶Arfan Ikhsan, dkk., *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 35

³⁷Conny R Semiawan., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarang: Grasindo, 2010), hal. 7

³⁸Moleong L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda karya*, Bandung, 2010.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tanjung Balai yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai bulan Februari 2021.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sering diklaim metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam syarat yang alamiah. Metode kualitatif dipakai buat menerima data yang mendalam yaitu data yang mengandung makna. Makna merupakan data yang sebenarnya, data yang niscaya adalah suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh lantaran itu, pada penelitian kualitatif tidak menekankan dalam generalisasi, namun lebih menekankan dalam makna.³⁹ Dengan menggali lebih pada kabar tentang kualitas pelaporan dan pencatatan laporan keuangan melalui asal yang bonafide menggunakan berbekal pemahaman berupa teori dan wawasan yang relatif sebagai akibatnya penulis bisa bertanya dan menganalisis pada situasi sosial sebagai akibatnya sebagai lebih kentara dan bermakna apakah pelaporan keuangan BAPPEDA Tanjung Balai telah mengoptimalkan sistem akuntansi berbasis akrual.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

³⁹Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 14

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.⁴⁰ Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai BAPPEDA Tanjung Balai dan juga data data pendukung lainnya yang ditemukan langsung oleh peneliti di lokasi.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data internal perusahaan atau entitas yang diperoleh dari objek yang diteliti berupa data atau dokumen terkait sistem akuntansi berbasis akrual dan dokumen lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan narasumber atau personel yang terkait seputar pokok permasalahan penelitian. Metode ini merupakan memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan beberapa pertanyaan kepada responden. Pewawancara mengendalikan topik apa yang akan dipertanyakan dan responden atau orang yang diwawancarai dimintai untuk memberikan informasi.⁴¹ Melalui wawancara, peneliti berusaha mendapatkan informasi lebih mendalam yang ada pada objek penelitian, sehingga peneliti lebih mudah menentukan variabel atau masalah yang harus diteliti.⁴² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan penulis pada pihak yang berwenang dalam bidangnya, sehingga informasi atau yang ingin diperoleh akan sesuai.

⁴⁰Arfan Ikhsan, dkk., Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 122

⁴¹*Ibid.*, hal. 123.

⁴²Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 197

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data-data sekunder dari BAPPEDA Tanjung Balai berupa laporan-laporan, catatan-catatan, dan materi pendukung lainnya.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dari data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dengan dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data tersebut.

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif sendiri memiliki arti sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini penulis berusaha memaparkan dan menjelaskan mengenai implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan yang diperoleh dari BAPPEDA Tanjung Balai dan memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

F. Tahapan Analisis Data

Langkah-langkah tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dan diidentifikasi sesuai yang dibutuhkan peneliti mengenai implementasi dan optimalisasi

⁴³Arfan Ikhsan, dkk., *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 33

sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari BAPPEDA Tanjung Balai dikategorikan dan dipelajari menurut pokok permasalahan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan keterangan sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan yang lain.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan pengumpulan dan penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan sementara akan diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber dan metode. Triangulasi data yaitu teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dan informasi dari sumber yang sama.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah di verifikasi.

BAB IV

HASIL

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum BAPPEDA Tanjung Balai

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Melalui tempat kerja ini, BAPPEDA pemerintah wilayah melakukan perencanaan pembangunan dalam daerah dan wilayah kerjanya. Tugas Bappeda merupakan membentuk wilayah menurut penelitian bidang pembangunan dan kemasyarakatan, penyusunan acara pembangunan tahunan, sampai perancangan aturan pembangunan. Terkait tugas dan fungsi tadi, maka BAPPEDA juga mempunyai peran kewenangan persuratan dan perizinan pembangunan perumahan dan pertokoan bagiceveloper, salah satu surat tersebut merupakan izin prinsip buat perizinan membentuk bangunan baik tempat tinggal dan property lain dan surat Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

a. Visi dan Misi

1) Visi

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang bersinergi, berkualitas dan aplikatif menuju tanjungbalai berprestasi

2) Misi

- a. Mewujudkan SDM Perencana yang handal
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif dan aplikatif
- c. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang terintegrasi

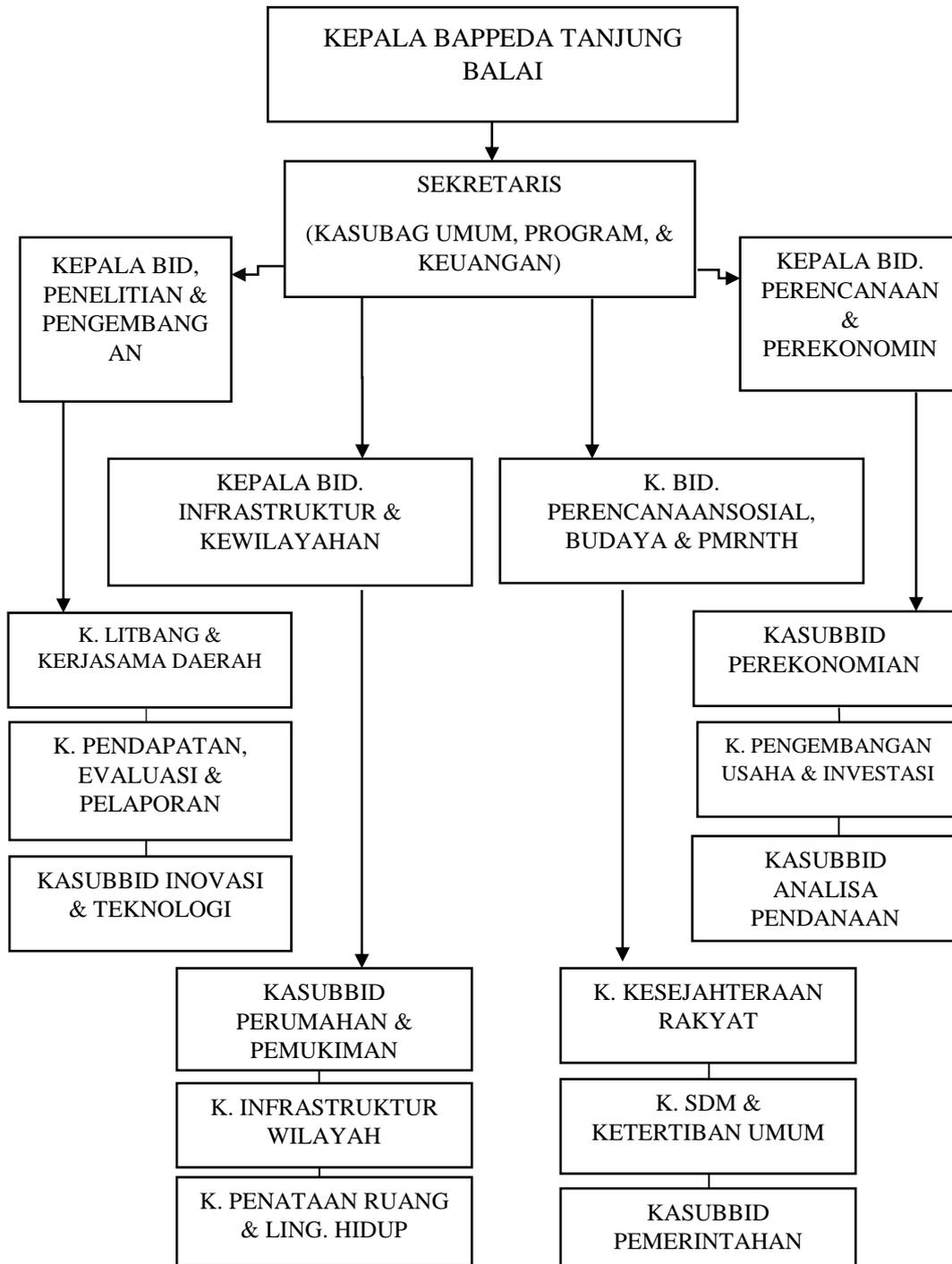
2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang bagian-bagian serta tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Struktur organisasi sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tugas wewenang dan tanggung jawab seseorang.

Struktur organisasi bukan merupakan suatu tujuan perusahaan, tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi yang baik akan membantu berhasilnya pencapaian tujuan perusahaan. Bentuk organisasi yang baik tergantung dari situasi dan kondisi organisasi perusahaan dan tujuan yang ingin dicapainya, sehingga masing-masing organisasi berbeda satu sama lain struktur organisasinya, karena bentuk organisasi yang ada ditujukan untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan masing-masing perusahaan tersebut.

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada BAPPEDA Tanjung Balai adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi



Gambar 4.1

1. Kepala BAPPEDA

Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan fungsi Pengkoordinasian dibidang :

- a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan litbang,
- b) Perencanaan perekonomian,
- c) Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan,
- d) Perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan,
- e) Penyiapan dan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPAS-P,
- f) Penyiapan dan penyusunan RPJP, RPJM, RKPD,
- g) Penyusunan RTRW dan RDTRK,
- h) Perumusan kebijakan, kerjasama, pemeliharaan hasil, penyiapan bahan dalam rangka publikasi dalam hal penelitian dan pengembangan,
- i) Pelaksanaan pengukuran IPM,
- j) Kerjasama perencanaan pembangunan antara daerah dengan swasta baik dalam dan luar negeri,
- k) Pelaksanaan Monev pelaksanaan perencanaan pembangunan,
- l) Penyusunan Renstra dan Renja,
- m) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang perencanaan pembangunan daerah, dan lain sebagainya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bappeda meliputi pembinaan, ketatalaksanaan hukum, kerumahtanggaan, humas, perlengkapan, kepegawaian, menghimpun data statistik, perumusan rencana dan program keuangan dalam pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Bappeda dan semua unsur dilingkungan Bappeda, dengan Fungsi pengkoordinasian :

- a) Kegiatan Bappeda,
- b) Penyusunan rencana, program dan anggaran,

- c) Penyusunan kerangka regulasi dan perencanaan pembangunan
- d) Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda
- e) Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA,
- f) Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
- g) Penyusunan anggaran keuangan, administrasi keuangan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan
- h) Pelaksanaan dan pembinaan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, urusan rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, keprotokolan, dan kepastakaan
- i) Penyiapan analisa kebutuhan pengadaan administrasi dan inventarisasi barang perlengkapan serta melakukan perawatan dan pemeliharaan
- j) Pelaksanaan Koordinasi RPJP, RPJM, RKPD, KUA dan PPAS, KUPA dan PPAS-P.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :

1) Kasubbag Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian

Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) Administrasi, Tata Usaha, Kepegawaian, kerumahtanggaan, administrasi perjalanan dinas pegawai, meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku, penyusunan DUK
- b) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi, pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP
- c) Menginventarisasi aset pemerintah.

2) Kasubbag Program

Kasubbag Program mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah
- b) Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

- c) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD, PK, RPJP, RPJM, RKPD, KUA & PPAS, KUPA & PPAS-P, DPA, DPPA.

3) Kasubbag Keuangan

Kasubbag Keuangan mempunyai tugas :

- a) Admisnistrasi Keuangan meliputi Penyusunan, pembukuan pertanggungjawaban serta laporan keuangan
- b) Penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan,
- c) Pelaksanaan DPA dan DPPA
- d) Menyiapkan usulan SPP untuk diproses
- e) Menyusun laporan keuangan
- f) Menyusun Laporan Bulanan
- g) Verifikasi SPJ Keuangan
- h) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3. Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bappeda yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Litbang
- b) Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis litbang, koordinasi penyusunan perencanaan pelaksanaan program dibidang litbang, pengembangan hasil penelitian, dalam rangka perencanaan daerah
- c) Melaksanakan penelitian dan pengembangan kajian dalam rangka perencanaan pembangunan dibidang keuangan, pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat

- d) Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan pada perangkat daerah
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan litbang
- f) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kabid Litbang dibantu oleh :

1) Kepala Sub Bidang Litbang Dan Kerjasama Daerah

Kepala Sub Bidang Litbang dan Kerjasama Daerah mempunyai tugas :

- a) Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan
- b) Menyusun perencanaan program dan anggaran serta melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kerjasama daerah
- c) Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah
- e) Penyusunan DPA dan DPPA.

2) Kepala Sub Bidang Pendataan, Evaluasi Dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

- a) Menghimpun bahan kajian teknik sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan
- b) Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan
- c) Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan

- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah
 - e) Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penilaian
 - f) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah,
 - g) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kab/kota dan provinsi
 - h) Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah
 - i) Mengelola dan menyusun hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program kegiatan pembangunan daerah
 - j) Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi
 - k) Menyusun RPJP, RPJM, dan RKPD, KUA&PPAS, KUPA & PPAS-P, DPA dan DPPA.
- 3) Kepala Sub Bidang Inovasi Dan Teknologi
- Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi teknologi
 - b) Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, da metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif
 - c) Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berteknologi
 - d) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi

- e) Penyusunan DPA dan DPPA.

4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bappeda yang berkaitan dengan Bidang Perencanaan Perekonomian dengan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ekonomi, pengembangan usaha dan investasi serta analisis pendanaan
- b) Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis, perencanaan pembangunan dibidang ekonomi, pengembangan usaha serta analisis pendanaan
- c) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang ekonomi, pengembangan usaha serta analisis pendanaan
- d) Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan koordinasi pengelolaan pembangunan ekonomi, pengembangan usaha dan investasi serta analisis pendanaan
- e) Pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan dibidang ekonomi, pengembangan usaha dan investasi serta analisis pendanaan
- f) Perencanaan teknis kerjasama pembangunan ekonomi antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri
- g) Pengkoordinasian perencanaan pemanfaatan dan pengembangan potensi ekonomi
- h) Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan investasi daerah
- i) Pengkoordinasian perencanaan peningkatan sumber – sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kabid Perencanaan Perekonomian dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Bidang Perekonomian

Kepala Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas :

- a) Pengumpulan dan Pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan pembangunan dibidang perekonomian
 - b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di perencanaan perekonomian
 - c) Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan koordinasi pengelolaan pembangunan perekonomian
 - d) Pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan perekonomian
 - e) Perencanaan teknis kerjasama pembangunan ekonomi antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri.
- 2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Dan Investasi
Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas :
- a) Pengumpulan dan Pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan pembangunan dibidang pengembangan usaha dan investasi
 - b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di perencanaan bidang pengembangan usaha investasi
 - c) Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan koordinasi pengelolaan pembangunan bidang pengembangan usaha dan investasi
 - d) Menyusun usulan rencana dan pelaksanaan program perencanaan pengembangan usaha dan investasi
 - e) Merencanakan teknis kerjasama pengembangan usaha dan investasi antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri
 - f) Melaksanakan konsultasi perencanaan pengembangan usaha dan investasi.
- 3) Kepala Sub Bidang Analisis Pendanaan
Kepala Sub Bidang Analisis Pendanaan mempunyai tugas :
- a) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan pembangunan dibidang analisis pendanaan

- b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di perencanaan bidang analisis pendanaan
- c) Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan koordinasi pengelolaan pembangunan analisis pendanaan
- d) Mengkoordinasikan perencanaan pemanfaatan, analisis pendanaan dan pengembangan potensi ekonomi
- e) Mengkoordinasikan perencanaan peningkatan sumber sumber pembiayaan pembangunan daerah.

5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda yang berkaitan dengan bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dengan fungsi sebagai berikut :

- a) Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana pembangunan dibidang perumahan, permukiman dan keciptakaryaan
- b) Dalam penyusunan rencana pembangunan dibidang infrastruktur kewilayahan
- c) Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana pembangunan dibidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh :

1) Kepala Sub Bidang Perumahan Dan Permukiman

Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas :

- a) Pengumpulan, pengolahan data dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, permukiman dan keciptakaryaan
- b) Pemberian konsultasi dan bimbingan pengelolaan kawasan perumahan, permukiman dan keciptakaryaan

- c) Fasilitasi penerimaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta koordinasi bidang perumahan, permukiman dan keciptakaryaan
- d) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, permukiman dan keciptakaryaan dan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah

Kepala Sub Bidang infrastruktur Wilayah mempunyai tugas :

- a) Pengumpulan, Pengolahan data dan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan, kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan
- b) Pemberian konsultasi dan bimbingan keserasian pengembangan bidang pengembangan infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan, kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan
- c) Fasilitasi dan koordinasi bidang pengembangan infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan, kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan, 4). Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang pengembangan infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan, kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3) Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup

Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a) Penyusunan Dokumen yang berhubungan dengan Tata Ruang
- b) Pengelolaan data dan informasi perencanaan tata ruang
- c) Fasilitasi dan koordinasi kerjasama teknis penataan ruang

- d) Pemberian konsultasi dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan dibidang tata ruang
- e) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penataan ruang dan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

6. Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Budaya Dan Pemerintahan

Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda yang berkaitan dengan Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan dengan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kerja bidang sosial, Budaya dan Pemerintahan
- b) Penyusunan data perencanaan, Perumus Kebijakan Teknis serta Evaluasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perputakaan, kerasipan, keagamaan, hukukum dan pemerintahan
- c) Perumusan usulan program kegiatan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan
- d) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang sosial, budaya dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kabid Sosial,Budaya dan Pemerintahan dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a) Penyusunan Rencana Kerja bidang kesejahteraan rakyat
- b) Penyiapan bahan untuk penyusunan data, Perumusan Kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan, Evaluasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan, Perumusan usulan program dan kegiatan pembangunan serta penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan
- c) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub bidang kesejahteraan rakyat
- d) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesejahteraan rakyat dengan unit kerja lainnya.

2) Kepala Sub Bidang SDM Dan Ketentraman Ketertiban Umum

Kepala Sub Bidang SDM dan Ketentraman Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a) Penyusunan rencana kerja sub bidang SDM dan Ketentraman ketertiban umum
- b) Penyiapan bahan untuk penyusunan data, perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan, evaluasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan, perumusan usulan program dan kegiatan pembangunan, penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

- c) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub bidang Ketentraman ketertiban umum
- d) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang Ketentraman ketertiban umum dengan sub unit lainnya dilingkungan badan.

3) Kepala Sub Bidang Pemerintahan

Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Penyusunan rencana kerja sub bidang pemerintahan
- b) Penyiapan bahan untuk penyusunan data, perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan, evaluasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan, perumusan usulan program dan kegiatan pembangunan, penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang Pemberdayaan Masyarakat, keagamaan, hukum dan pemerintahan
- c) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dibidang pemerintahan
- d) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dengan sub unit kerja lain dilingkungan badan.

B. Pembahasan

1. Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di BAPPEDA Tanjung Balai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan & Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Pemda maka Pemda wajib menerapkan Akuntansi

Berbasis Akrua. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, BAPPEDA Tanjung Balai menyusun laporan keuangan menggunakan berpedoman dalam Standar Akuntansi Pemerintah buat menaikkan kualitas pelaporan pemerintahan, sebagai akibatnya bisa menaikkan kredibilitasnya yang dalam gilirannya bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah wilayah dan menyampaikan secara penuh aktivitas yang terdapat menggunakan sumberdaya yang memperlihatkan ketaatan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pengukuran dilihat menurut parameter integritas dan koitmen secara holistik dalam biasanya menyatakan siap menurut masing-masing indikator. Penilaian penerapan menurut parameter asal daya insan ditekankan dalam pegawai akuntansi yang akan melaksanakan pada menerapkan SAP berbasis akrua penuh menurut PP No. 71 tahun 2010. Pentingnya asal daya insan pada bidang akuntansi dan keuangan dijelaskan menggunakan output wawancara yang dihasilkan menurut kassubbag keuangan, menyatakan bahwa :

“SDM yang diharapkan buat keberhasilan penerapan SAP berbasis akrua wajib memperhatikan seluruh orang yang terlibat pada pemerintahan khususnya pegawai akuntansi yang akan mengerjakannya. Dan kesiapan SDM pada hal ini pegawai akuntansi didukung menggunakan kesiapan pengetahuan, keterampilan dan keahlian sebagai akibatnya akan tercapai sinkron menggunakan tujuan penerapan SAP nantinya”. Dalam teori stakeholder dijelaskan mengenai eksistensi pemerintahan pada menjalankan tugasnya dan menaruh donasi bagi pemegang saham, kreditur, pemerintah, rakyat dan pihak-pihak lainnya atau dianggap stakeholder. Dan waktu menciptakan keputusan yang strategis organisasi wajib peduli menggunakan kepentingan para stakeholder.

Dari pernyataan tadi bisa disimpulkan bahwa kualitas pelaporan ditentukan sang stakeholder dan juga kebalikannya menghipnotis stakeholder. Untuk menerima output yang seksama & terpercaya pada pengimplementasian sistem akuntansi berbasis akrua wajib didukung menurut aneka macam aspek dan yang paling utama yaitu asal daya insan.

Dan pada mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual terdapat beberapa hambatan yang terjadi, misalnya diungkapkan staf bagian keuangan yang mengatakan :

“Kesulitan yang sering ditemui pada tahun tahun awal BAPPEDA Tanjung Balai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual yaitu soal pemahaman, karena belum bisa sepenuhnya memahami sistem tersebut. Dan sampai saat ini berkat kerja keras para pegawai dan masyarakat dapat menikmati manfaatnya seperti laporan yang lebih baik dan transaksinya tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan dalam penyajian informasinya”.

Islam sudah mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja harus dinilai, sebagaimana dalam Alquran surah At-Taubah ayat 9:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (At-Taubah:105)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa katakan pada insan, wahai Rasulullah, "Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian, Rasulullah dan orang-orang Mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbangannya menggunakan timbangan keimanan dan bersaksi menggunakan perbuatan- perbuatan itu. Kemudian sehabis mati, kalian akan dikembalikan pada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin kalian, lalu mengganjar menggunakan perbuatan- perbuatan kalian sehabis Dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan besar menurut perbuatan kalian itu.

Dengan pelaporan berbasis akrual, penggunaan bisa mengidentifikasi

posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sinkron dengan pendanaanya sebagai bisa diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual pula memungkinkan pemerintah buat mengidentifikasi kesempatan pada memakai sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tadi. SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas pada pelaporan finansial berbasis akrual, dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada pelaporan aplikasi aturan dari basis yg ditetapkan pada APBN atau APBD.

Stewardship theory menegaskan bahwa situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi dari tujuan-tujuan individu namun lebih ditujukan dalam target output primer mereka buat kepentingan organisasi. Teori tadi mengemukakan bahwa adanya interaksi yang bertenaga antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Stewardship theory dibangun atas perkiraan filosofis tentang sifat insan, bahwa insan dalam hakekatnya bisa dipercaya, sanggup bertindak menggunakan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dari tentang-tentang dan dipertegas sang teori pada atas bisa diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tanjung Balai sudah mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual menggunakan mengikuti pengenalan atau pembinaan sebagai akibatnya kualitas pelaporan pemerintahan bisa terlihat menurut output atau manfaat yang sudah dihasilkan selama memakai sistem tersebut. Sementara tujuan pemerintah menerapkan sistem akrual yaitu buat membuat laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan buat pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Dari output wawancara yang sudah dilakukan BAPPEDA Tanjung Balai telah mengimplementasikan sinkron menggunakan tujuan pemerintah.

2. Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua di BAPPEDA Tanjung Balai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan & Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Pemda maka Pemda wajib menerapkan Akuntansi Berbasis Akrua. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku bagian menurut pemerintah wilayah Tanjung Balai menyusun laporan keuangan berpedoman dalam Standar Akuntansi Pemerintah buat menaikkan lagi kualitas laporan keuangan, sebagai hasil yang baik bisa menaikkan kredibilitasnya yang dalam gilirannya bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah wilayah dan membicarakan secara penuh aktivitas yang terdapat menggunakan sumberdaya yang menampakan ketaatan dalam Peraturan Perundang-undangan. Ketika akrua hendak dilakukan sepenuhnya untuk mendeskripsikan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh menurut penerapan akrua merupakan tergambarannya informasi operasi atau aktivitas. Dalam sektor komersial, citra perkembangan operasi atau aktivitas ini dituangkan pada Laporan Laba Rugi. Sedangkan pada akuntansi pemerintah, laporan homogen ini diciptakan pada bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit.

Dengan demikian, perbedaan dari kongkrit yang paling memerlukan perhatian merupakan jenis/komponen laporan keuangan. Perbedaan fundamental SAP PP 24/2005 menggunakan SAP Akrua terletak dalam PSAP 12 tentang Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya asal daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung buat menjalankan aktivitas pemerintahan. Surplus/defisit operasional adalah penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan higienis entitas pemerintahan bersangkutan.

Teori keagenan pula menyebutkan bahwa konsep yang mendasari pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Dalam menyusun pelaporan keuangan, agen pada hal ini pemerintah memiliki kewajiban menyajikan dan

melaporkan informasi yang berguna secara pribadi atau tidak pribadi melalui wakil- wakilnya pada hal ini menjadi prinsipal yang bertindak pada menilai akuntabilitas dan menciptakan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, juga politik. Harus disadari bahwa masih ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun pemerintah menjadi dasar buat pengambilan keputusan. Oleh karenanya informasi pada laporan keuangan wajib berkualitas, informasi pada laporan keuangan yang akan dipublikasikan tadi wajib tersaji secara masuk akal terbebas menurut salah satu yang material, sebagai akibatnya tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan berguna bila laporan keuangan yang diinformasikan tersaji menggunakan valid dan bisa diandalkan. Perbandingan komponen laporan keuangan anatara basis kas menuju akrual dan basis akrual bisa ditinjau menurut tabel dibawah:

Tabel 4.1 : Perbandingan Komponen Laporan Keuangan Antara Basis Kas Menuju Akrual & Basis Akrual

Komponen laporan keuangan basis kas menuju akrual	Komponen laporan keuangan berbasis akrual
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Laporan arus kas (LAK) 4. Catatan atas laporan keuangan (CLAK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi anggaran (LRA) 2. Laporan perubahan saldo anggaran ,lebih 3. Neraca 4. Laporan operasisonal 5. Laporan arus kas 6. Laporan perubahan ekuitas 7. CaLK

Akuntansi berbasis akrual untuk tingkatakan mutu pelaporan harus menyajikan kenyataan terkait perhitungan atas aplikasi kegiatan yang telah dianggarkan. Laporan keuangan SKPD terdiri bersumber pada:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan kenyataan realisasi pendapatan- LRA, belanja, transfer,

surplus/ defisit- LRA, serta pembiayaan, yang tiap- tiap diperbandingkan memakai anggarannya pada satu periode. Data tadi berguna untuk para pengguna laporan pada mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumberdaya ekonomi, akuntabilitas serta ketaatan entitas pelaporan terhadap ketentuan memakai sediakan kenyataan tentang sumber alokasi serta pemakaian sumberdaya ekonomi, & pula sediakan kenyataan tentang realisasi ketentuan secara merata yang berguna buat mengevaluasi kinerja pemerintah pada perihal efisiensi serta daya guna pemakaian ketentuan.

Unsur- unsur Laporan Realisasi Anggaran didalam basis akrual ialah:

- a. Pemasukan LRA ialah penerimaan si Bendahara Universal Wilayah yang menaikkan saldo ketentuan lebih pada periode tahun ketentuan yang bersangkutan yang selaku hak pemerintah. Serta tidak butuh dibayar kembali oleh pemerintah
- b. Belanja ialah segala pengeluaran oleh Bendahara Universal Wilayah yang kurangi saldo ketentuan lebih pada periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak hendak pula diperoleh pembayarannya kembali pemerintah
- c. Transfer merupakan penerimaan ataupun pengeluaran duit sesuatu entitas pelaporan bersumber pada ataupun kepada entitas pelaporan laoin. Termasuk dana perimbangan dan dana untuk hasil
- d. Surplus/ Defisit LRA
- e. Pembiayaan ialah tiap penerimaan ataupun pengeluaran yang tidak mempengaruhi dalam kekayaan higienis entitas yang butuh dibayar kembali serta ataupun hendak diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan pula tahun- tahun ketentuan selanjutnya. Yang pada penganggaran pemerintah dimaksudkan dalam menutup defisit ataupun menggunakan surplus ketentuan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat dari bersumber pada pinjaman & hasil investasi. pengeluaran pembiayaan antara lain dipakai buat pembayaran kembali utama pinjaman, anugerah pinjaman pada entitas lain, dan pernyataan kapital si pemerintah

f. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran

2) Neraca

Ialah laporan yang mendeskripsikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan tentang peninggalan, kewajiban serta ekuitas dalam bertepatan pada serta periode tertentu. Faktor neraca yang masih terdapat pada basis akrual ialah:

- a. Aset (asal energi ekonomi yg dipahami ataupun dimiliki pemerintah jadi akibat bersumber pada insiden masa lalu; bersumber pada mana khasiat ekonomi ataupun sosial pada masa depan dibutuhkan dapat diperoleh baik pemerintah maupun warga, serta dapat diukur pada satuan uang).
- b. Kewajiban(ialah utang yang terdapat bersumber pada insiden masa lalu setelah itu yang solusinya menimbulkan sumberdaya menurun).
- c. Ekuitas(tuntutan ataupun bagian hak owner terhadap aktiva industri ialah selisih antara aktiva serta kewajiban. Tanpa dilihat lebih lanjut ke ekuitas dana mudah, akuitas dana investasi serta ekuitas dana cadangan sebagaimanadalam basis kas mengarah akrual. Serta kekayaan higienis pemerintah yang merupakan selisih antara peninggalan serta kewajiban pemerintah).

3) Laporan Pergantian Ekuitas Ekuitas ialah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara peninggalan serta kewajiban pemerintah. Laporan perubahan ekuits menyajikan informasi peningkatan ataupun penyusutan ekuitas diawali bersumber pada tahun pelaporan& dibandingkan memakai tahun tadinya.

4) Laporan Operasional Ialah laporan yg menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menaikkan ekuitas serta penggunnannya. Laporan operasional sediakan kenyataan tentang seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercatat pada pendapatan- LO, beban,& surplus/ defisit operasional bersumber pada sesuatu entitaas pelaporaan yang penyajiannya disandingkan degan periode tadinya. Laporan operasional sediakan kenyataan

semacam:

- a. Menimpa besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah buat melaksanakan pelayanan.
- b. Menimpa pembedahan keuangan secara merata yang berguna pada mengevaluasi kinerja pemerintah pada perihal efisiensi, daya guna serta kehematan perolehan serta penggunaan asal energi ekonomi serta lain-lain.

Unsur- unsur yang masih terdapat pada pada Laporan Operasional ialah:

- a. Pendapatan- LO bersumber pada kegiatan operasional
- b. Beban bersumber pada kegiatan operasional
- c. Surplus/ Defisit bersumber pada kegiatan non operasional(apabila terdapat)
- d. Pos luar biasa(apabila terdapat)
- e. Surplus/ Defisit- LO

5) Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK)

Meliputi penjelasan deskriptif ataupun rincian bersumber pada angka yang diberikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Pergantian Ekuitas, Neraca, serta Laporan Arus Kas. Sistem akuntansi berbasis akrual pula berisi data tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan serta kenyataan lain yang diwajibkan buat diungkapkan pada SAP untuk membuat penyajian laporan keuangan secara normal.

Tabel 4.2 : Rincian Beban Pegawai Tahun 2019 dan 2020

URAIAN	SALDO		Kenaikan/ (Penurunan)
	2019	2020	
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp1.958.200.000	Rp2.203.000.000	Rp244.800.000
Beban Tambahan Penghasilan PNS	Rp100.220.000	Rp102,500.000	Rp2.280.000

Beban Uang Lembur PNS	Rp157.530.000	Rp140.300.000	(Rp17.230.000)
Beban Uang Lembur Non PNS	-	Rp1.150.000	Rp1.500.000
Beban Honor Bulanan	Rp29.500.000	Rp35.600.000	Rp6.100.000
Beban Honorarium Pegawai Honorer	-	Rp24.850.000	Rp24.850.000
Jumlah	Rp2.245.450,000	Rp2.507.400.000	Rp261.950.000

Sumber : Data Sekunder yang di olah

Dihat dari tabel, diketahui bahwa kualitas kerja pegawai di BAPPEDA Tanjung Balai mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan rincian beban pegawai di tahun 2019 menggunakan total anggaran Rp2.245.450.000. Sedangkan di tahun 2020 total anggaran yang digunakan Rp2.507.400.000, seperti diketahui oleh penulis dari beberapa informan di BAPPEDA Tanjung Balai mengatakan bahwa pegawai BAPPEDA Tanjung Balai dalam mengimplementasikan dan untuk mengoptimalkan sistem akuntansi berbasis akrual sangat meningkat, dapat dilihat dari aturan yang dipakai mrnurut dari tahun 2018 sampai tahun 2019 juga meningkat. Dan menurut dari wawancara yang dilakukan penulis kenapa anggaran yang di pakai sangat tinggi, seperti yang diketahui bahwa sistem akuntansi berbasis akrual sudah bisa dikatakan rumit, jadi butuh dana-dana seperti dana lembur para pihak pekerja di pemerintahan dan biaya lain-lain.⁴⁴

⁴⁴ Kepala BAPPEDA Tanjung Balai melalui wawancara

1. Pelaporan Keuangan SKPD Rincian Beban Operasi Tahun 2019 dan 2018

Tabel 4.3 : Rincian Beban Operasi Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	SALDO		Kenaikan/
	2019	2018	(Penurunan)
Beban Pegawai – LO	Rp2.202.300.000	-	Rp2.202.300.000
Beban Barang dan Jasa	Rp2.000.150.000	-	Rp2.000.150.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp113.505.000	-	Rp113.505.000
Jumlah	Rp4.315.955.000	-	Rp4.315.955.000

Sumber: Data Sekunder yang ditemukan

Seperti diketahui beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang bisa berupa pengeluaran atau misalnya seperti konsumsi aset juga timbulnya kewajiban. Dan pada akuntansi beban merupakan pengurang menurut dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih atau keuntungan higienis pada perusahaan sebelum pajak pada laporan laba rugi. Dan beban juga bisa dipakai menjadi standar penurunan manfaat suatu ekonomi pada satu periode akuntansi yang berbentuk kas keluar.

2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD pada Tahun 2019

Pada tahun 2019 anggaran BAPPEDA Tanjung Balai sebesar Rp4.280.941.000 yang terdiri dari:

**Tabel 4.4 : Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun
2019**

URAIAN	Belanja tidak langsung	Belanja langsung
Gaji Pokok PNS	Rp1.437.316.000	-
Tunjangan Keluarga	Rp115.705.000	-
Tunjangan Jabatan	Rp170.106.000	-
Tunjangan Umum	Rp50.809.000	-
Tunjangan Beras	Rp90.406.000	-
Tunjangan PPh	Rp29.310.000	-
Pembulatan Gaji	Rp29.000	-
Belanja Pegawai	-	Rp400.530.000
Belanja Barang/Jasa	-	Rp1.805.730.000
Belanja Modal	-	Rp50.000.000
Tambahan Penghasilan PNS	Rp131.000.000	-
Jumlah	Rp2.024.681.000	Rp2.256.260.000

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Pada tahun aturan 2019 BAPPEDA Tanjung Balai melaksanakan kegiatan yang berkaitan untuk peningkatan kinerja pegawai.

a. Program Pelayanan Adm Perkantoran

Program ini bertujuan demi mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan merapikan tata persuratan perkantoran secara umum, menggunakan alokasi dana anggaran sebanyak Rp440.000.000, dan terlaksana sebanyak Rp403.720.000. Anggaran tersebut terdiri memiliki enam kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (aktivitas

ini bertujuan guna membiayai layanan jasa komunikasi telepon dan layanan jasa listrik kantor).

- 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (aktivitas ini bertujuan melaksanakan pengadministrasian keuangan sehingga pengelolaan keuangan berjalan tertib dan akuntabel).
- 3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor (aktivitas ini bertujuan untuk memenuhi penggantian alat-alat listrik dan peralatan elektronik kantor).
- 4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (aktivitas ini bertujuan untuk pengadaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor).
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (bertujuan guna menyediakan bahan bacaan yang akan meningkatkan pengetahuan pegawai dan sarana publikasi yang memadai dalam penyampaian informasi serta pembiayaan iklan ucapan selamat).
- 6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (aktivitas ini berupa perjalanan dinas dalam daerah atau tingkat kabupaten dan luar daerah ditingkat provinsi dan luar provinsi, dalam rangka kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi program pembangunan daerah).

Dengan kegiatan-kegiatan tersebut akan terlayani pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan BAPPEDA Tanjung Balai.

b. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur BAPPEDA Tanjung Balai

Program ini bertujuan untuk menaikkan daya dukung kuantitas dan kualitas alat-alat demi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan menggunakan alokasi dana anggaran sebanyak Rp120.000.000, dan terlaksana sebanyak Rp163.406.000. Anggaran dana ini terdiri berdasarkan tiga aktivitas yaitu:

- 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (aktivitas ini ditujukan untuk belanja kapital misalnya seperti pengadaan personal komputer,

pengadaan peralatan personal komputer, pengadaan kursi kerja, pengadaan fax, dll).

- 2) Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional (pelaksanaan ini mencakup layanan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK tunggangan dinas).
- 3) Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor (untuk perbaikan/servis AC, komputer, printer, penggantian kompresor, penggantian spare part monitor sehingga peralatan tempat kerja terpelihara dengan sangat baik).

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur BAPPEDA Tanjung Balai

Program ini bertujuan menaikkan motivasi dan semangat kerja para aparatur, dengan menggunakan alokasi dana anggaran sebanyak Rp30.000.000 dan terlaksana sebanyak Rp30.000.000. Dana Anggaran ini terdiri berdasarkan duaaktivitas yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya Bagi Pegawai BAPPEDA.
- 2) Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu (misalnya seperti pakaian olahraga untuk dipakai pegawai BAPPEDA).

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan menaikkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya para pegawai melalui aktivitas pendidikan dan pembinaan formal, dengan menggunakan alokasi dana anggaran sebanyak Rp20.000.000, dan terlaksana Rp10.175.000. Dana ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal (pelaksanaan aktivitas ini merupakan perjalanan dinas bagi pegawai BAPPEDA untuk rangka pengembangan kapasitasnya perjalanan dinas luar daerah dan ddonasi pembinaan).

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja dengan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp20.000.000 dana terealisasi sebesar Rp20.000.000. Dana anggaran ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (laporan yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Semester dan pada Akhir Tahun yang meliputi Lap Realisasi Anggaran, Laporan..Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK).

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD pada Tahun 2020

Pada tahun 2020 anggaran dana BAPPEDA Tanjung Balai sebesar Rp5.666.061.000 terdiri dari:

Tabel 4.5 : Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2020

URAIAN	Belanja tidak langsung	Belanja langsung
Gaji Pokok PNS	Rp1.570.250.000	-
Tunjangan Keluarga	Rp107.560.000	-
Tunjangan Jabatan	Rp142.600.000	-
Tunjangan Umum	Rp49.170.000	-
Tunjangan Beras	Rp85.000.000	-
Tunjangan PPh	Rp30.093.000	-
Pembulatan Gaji	Rp26.000	-

Belanja Pegawai	-	Rp690.800.000
Belanja Barang/Jasa	-	Rp2.590.062.000
Belanja Modal	-	Rp295.100.000
Tambahan Penghasilan PNS	Rp105.400.000	-
JUMLAH	Rp2.090.099.000	Rp3.575.962.000

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Pada tahun anggaran 2020 BAPEDDA Tanjung Balai melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan kinerja pegawai BAPPEDA Tanjung Balai yaitu:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan tata rapi persuratan perkantoran secara umum, dengan menggunakan alokasi dana anggaran sebanyak Rp339.000.000, dan dana terlaksana sebesar Rp302.581.000. Program ini terdiri berdasarkan 6 kegiatan, yaitu:

- 1) Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (aktivitas ini bertujuan untuk membiayai layanan jasa komunikasi telepon dan layanan jasa penerangan listrik tempat kerja).
- 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (aktivitas ini bertujuan melaksanakan penadministrasian keuangan kantor diantaranya, misalnya pengelolaan, penganggaran, inspeksi keuangan secara tertib, dan lain-lain).
- 3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor (aktivitas ini untuk memenuhi penggantian alat-alat listrik dan alat-alat elektronik kantor).
- 4) Penyediaan alat-alat dan Perlengkapan Kantor (aktivitas ini diperuntukkan untuk pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih tempat kerja).
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan (aktivitas ini untuk meningkatkan pengetahuan pegawai dan sarana publikasi yang memadai pada penyampaian keterangan serta pembayaran iklan).
- 6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (aktivitas ini berupa

perjalanan dinas atau bepergian dalam wilayah atau tingkat kabupaten, luar wilayah ditingkat provinsi dan luar provinsi dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi program pembangunan wilayah)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Tanjung Balai

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung kuantitas dan kualitas peralatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan alokasi dana sebesar Rp230.300.000 dan terealisasi sebesar Rp220.044.000. Dari program ini memiliki 4 kegiatan antara lain:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional (kegiatan ini untuk pengadaan kendaraan dinas bermotor)
- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (kegiatan ini bertujuan untuk belanja modal kantor)
- 3) Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas
- 4) Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor (kegiatan ini bertujuan untuk perbaikan atau servis sehingga peralatan kantor dapat terus terpelihara dengan baik)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja para aparatur dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp42.000.000 dan terealisasi sebesar Rp42.000.000. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Harian (kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan pakaian dinas harian (PHD) bagi pegawai BAPPEDA Tanjung Balai)
- 2) Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu (kegiatan ini untuk pengadaan pakaian seperti pakaian olahraga bagi pegawai BAPPEDA)

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Tanjung Balai

Program ini merupakan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan sumber daya aparatur dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, memiliki alokasi dana anggaran sebesar Rp156.000.000 dan terealisasi sebesar Rp155.580.000. Program ini mempunyai 2 kegiatan yaitu:

- 1) Pendidikan & Pelatihan Formal (pelaksanaan ini untuk perjalanan dinas dan kontribusi biaya pendidikan bagi aparatur BAPPEDA Tanjung Balai)
- 2) Studi Pemahaman Perencanaan & Penganggaran (kegiatan ini ditujukan untuk perjalanan dinas dalam rangka belajar pemahaman perencanaan dan penganggaran)

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Program tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan satuan organisasi kerja melalui penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Dengan alokasi dana anggaran Rp20.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp20.000.000. program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (kegiatan ini merupakan berupa Buku Lap. Pertanggungjawaban Keuangan Awal dan Buku Lap. Pertanggungjawaban Keuangan Akhir 2019, merupakan meliputi Lap. Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Lap. Operasional (LO), Lap. Perubahan Ekuitas (LPE), juga Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada aparatur BAPPEDA Tanjung Balai, diketahui dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bahwa kualitas laporan yang sudah tersaji dimana kegiatan-kegiatan tersebut berjalan efektif dan efisien dimulai tahun 2018 hingga 2019 dan sudah terealisasi hingga tahun sekarang, untuk meningkatkan kualitas pelaporan selama memakai sistem akuntansi berbasis akrual telah bisa dirasakan hingga sekarang (Sekretaris BAPPEDA Tanjung Balai, melalui wawancara).

Dari pernyataan mengenai Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD dalam tahun 2018 sampai tahun 2019 pertanda bahwa taraf kualitas pelaporan pemerintahan BAPPEDA Tanjung Balai, semakin tinggi menurut tahun 2018-2019, sinkron menurut output penelitian yg dihasilkan buat mengetahui optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual pada menaikkan kualitas pelaporan wajib memperhatikan pencapaian pencapaian ikhtisar realisasi sasaran kinerja keuangan dalam instansi atau tempat kerja tadi & hasilnya semakin tinggi menurut tahun 2018 hingga tahun 2019. Dan wajib memperhatikan acara-acara yg dilaksanakan yg berkaitan menggunakan kualitas kerja pemerintahan misalnya:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatu BAPPEDA Tanjung Balai
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur BAPPEDA Tanjung Balai
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan

Apakah dari kegiatan-kegiatan tadi telah berjalan secara efektif & efisien, dan diketahui bahwa terdapat empat ciri pada kualitas laporan keuangan yaitu:

- a. Dapat dipahami
- b. Relevan
- c. Keandalan
- d. Dan bisa dibandingkan

Dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan sang penulis yg berkaitan menggunakan implementasi & optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual pada menaikkan kualitas pelaporan pemerintahan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanjung Balai, dipandang menurut perbandingan komponen laporan keuangan antara basis kas menuju akrual & basis akrual & rincian-rincian aturan dan pelaporan yg sudah dilaksanakan begitupun menggunakan acara-acara yg terealisasi telah menyampaikan secara penuh aktivitas yg terdapat menggunakan sumberdaya yg memperlihatkan ketaatan dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun hasil penelitian ini memperlihatkan adanya aktivitas-aktivitas untuk mengoptimalkan dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual penuh

menurut PP No. 71 Tahun 2010, masih terdapat ada hambatan. Adanya kelemahan atau hambatan yg dihadapi BAPPEDA Tanjung Balai pada bidang kesiapan SDM nya. Maka BAPPEDA Tanjung Balai perlu lebih penekanan & mengoptimalkan pada mengatasi hambatan tadi. Dengan istilah lain, merupakan peningkatan komitmen, kemauan & integritas pemerintah buat menaikkan kualitas SDM nya sebelum mengoptimalkan kualitas pelaporan pemerintahnya atas penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada upaya mendukung optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual buat menaikkan kualitas pelaporan & tugas pemerintahan.

Hasil sehubungan persetujuan-persetujuan yg dihadapi sang BAPPEDA Tanjung Balai untuk mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yaitu :

- a. Jumlah SDM buat pelaksana masih belum cukup, lantaran masih sebagian kecil saja yang tahu teknis SAP berbasis akrual . Dan buat kualitas masih sangat perlu di tingkatkan lantaran dalam biasanya pemahaman pegawai tentang akuntansi pemerintahan masih lemah & pemahaman mengenai penerapan basis akrual masih kurang.
- b. Sarana & prasarana telah ada tetapi masih belum mencukupi terutama pada masing-masing SKP, misalnya aplikasi buat menyusun laporan pertanggungjawaban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan optimalisasi tentang sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual untuk menaikkan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada Tanjung Balai, bisa disimpulkan bahwa :

- 1) Kualitas pelaporan keuangan pada kantor BAPPEDA Tanjung Balai sudah sesuai dengan menggunakan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimana pemerintah bertujuan untuk memberikan laporan yang lebih akurat dan bisa dipecahkan. Hal ini didukung dengan menggunakan adanya bukti yang kongkrit bahwa BAPPEDA Tanjung Balai telah mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan dan didukung rincian anggaran atau aturan yang telah menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual.
- 2) Dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual untuk menaikkan kualitas pelaporan pemerintah pada kantor BAPPEDA Tanjung Balai sudah berjalan, terlihat berdasarkan dari kegiatan-kegiatan yang telah BAPPEDA Tanjung Balai jalankan berkaitan dengan masalah kepegawaian telah berjalan sebagaimana dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dimana program tersebut dari program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, program Administrasi Perkantoran, program Peningkatan Sarana Prasarana dan Disiplin Para Aparatur, serta Pelayan Administrasi yang juga harus ditingkatkan. Namun, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal karena memiliki hambatan di SDM BAPPEDA Tanjung Balai juga wajib meningkatkan bimbingan teknologi untuk para pegawai. Dan buat mencukupi sarana dan prasarana di BAPPEDA Tanjung Balai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan pada BAPPEDA Tanjung Balai, maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1) Bagi Perusahaan

Masih diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman staf bagian keuangan BAPPEDA Tanjung Balai akan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akruaI, dan juga diharapkan pengkajian kondisi SDM pemerintahan serta BAPPEDA Tanjung Balai lebih menyiapkan SDM yang berintegritas tinggi dan kompetitif. Dan bila BAPPEDA Tanjung Balai ingin mempunyai SDM yang baik dalam melakukan penyusunan pelaporan keuangan pemerintahan dengan memakai sistem akuntansi berbasis akruaI, maka BAPPEDA Tanjung Balai wajib konsisten untuk menaikkan kualitas SDM nya. Dan juga seharusnya usahakan sering dilakukan sosialisasi yang berupa diskusi-diskusi dengan melibatkan aparat pemerintah, serta dilakukannya training atau pelatihan yang berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang menjadi SDM sebaiknya usahakan minimal S1.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian ini hanya meneliti tiga variabel, sehingga kurang mengeksplorasi faktor-faktor lainnya yang mungkin berpengaruh pada sistem akuntansi berbasis akruaI. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk menambah variabel dan fakto-faktor yang dapat meningkatkan sistem akuntansi berbasis akruaI, guna dapat mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian yang lebih baik dimasa depan, diharapkan mengambil data yang lebih detail agar hasil penelitian menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah N. N. (2009). *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi keuangan pemerintah Daerah*. Edisi Pertama Cetakan Ke-1, Penerbit Prenada Media Group Jakarta.
- Apriani, Tini. (2015). *Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Serang*, Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 4.
- Asfiansyah, Ahdony. (2015). *Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah*, Jurnal Neo-Bis. Vol. 9 No. 1.
- Baswir, Revrison. (1995). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Chairunnisa, Darwanis dan Sephi. (2013). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 6 No. 2.
- Dewi, Annasia Sophia. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Government*.
- Dimas Satrio. M, dkk, (2016). *Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, ISSN: 1411-0288 print / ISSN 2338-8137 online Vol. 18, No. 1.
- Elvira Zeyn. (2011). *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan*. Trikonomika. Vol. 10 No. 1.
- Farida Efriyanti, et. al. (2012). *Analisis Perbandingan Pengungkapan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 3, No. 2.
- IAI-KSAP. (2002).

- IFAC Public Sector Committee. (2014). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Indra Franselski Sampel, dkk. (2015). *Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual*. Jurnal EMBA. Vol. 3 No. 1.
- Jensen, M. (1983). Organizational theory and methodology. *Accounting Review*. Vol.56. No.3.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Buku 2. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kusuma dan Muhamad Indra Yudha. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 2 No. 1
- Kusuma, Ririz Setiawati. (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi kasus pada pemerintah kabupaten Jember)*. Skripsi (Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember).
- Lamonisi, Sony. (2016). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon*. Jurnal Akuntansi, ISSN: 2303-1174. (Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado).
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2014). *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2, Jakarta: Salemba 4.
- Mahardini. Nikke Yusnita, Ade Miranti. (2018). *Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015*. Jurnal Akuntansi, p-ISSN: 2339-2436, e-ISSN: 2549-5968. (Universitas Serang Raya).

- Mahmud, & Amir Pristiani. (2016). *Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Berdasarkan Demografi Pegawai*. *Journal Accounting Analysis*, Vol. 5 No.1.
- Mainardes. (2011). *Pengaruh Stakeholder Engagement Terhadap Pengungkapan Sustainability report*.
- Manoosoh, Hendrik. (2015). *Dalam Mewujudkan Good Government Governance pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15 No. 07.
- Margareta dan Weda Ayu. (2015). *Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 9.
- Muth, M. M., dan Donaldson, L. (1998). *Stewardship Theory and Board Structure: a Contingency Approach*. *Corporate Governance: An International Review*, 61.
- Najati, Ida, (2016). *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Vol. 14 No.1.
- Pradono, Febrian Cahyo. (2015) *Kualitas Laporan Keuangan...Pemerintah Daerah:Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd..Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*. Vol. 22, No. 2 Issn: 14123126.
- Pristiani. (2015). *Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Jabatan*. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*. Vol. 3 No. 01.

- Ranilhaj dan..Ersya Resya. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Unit Satuan Kerja Di Wilayah Kerja KPPN/Kota Bogor*. Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 2.
- Republik Indonesia. Permendagri No 31 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.
- Rosyada dan Ayu Amrina. (2016). *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda*. Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 1.
- Setiawan, Wahyu. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonsia*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Sukmaningrum, Tantriani. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Sulaeman, Abdul Hamid, Mukhlis Yunus. (2015). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai Dan Dampak nya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bireuen*. Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 No 4.
- Warda. (2016). *Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan*. Skripsi (Jakarta: Universitas Terbuka).

- Zeyn. E, (2011). *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, ISSN:2088-0685 Vol.1. No.1.
- Zoelisty. (2014). *Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Masjid*. Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Daftar Pertanyaan & Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan BAPPEDA Tanjung Balai mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada pelaporan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan ?	Narasumber : Kepala BAPPEDA Tanjung Balai Dari hasil wawancara yang diterima dari kepala BAPPEDA Tanjung Balai bahwa BAPPEDA Tanjung Balai sudah mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 sampai sekarang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kepala BAPPEDA Tanjung Balai juga mengatakan bahwa BAPPEDA Tanjung Balai banyak mengalami kesulitan di beberapa tahun-tahun pertama mengingat bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini merupakan hal yang baru, maka pegawai BAPPEDA Tanjung Balai banyak mengalami kesulitan dalam pelaporannya. Sumber daya manusia yang paling harus ditingkatkan lagi. Karena agar pengimplementasian sistem akuntansi berbasis akrual berjalan dengan sangat optimal SDM harus paham dan sudah terbiasa menerapkan sistem akuntansi

		<p>berbasis akrual. Tapi alhamdulillah seperti yang dikatakan kepala BAPPEDA Tanjung Balai bahwa implementasi sistem akuntansi berbasis akrual sudah bisa dikatakan optimal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAPPEDA Tanjung Balai untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan sistem tersebut.</p>
2.	<p>Apa hal yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pengimplemtasian sistem akuntansi tersebut ?</p>	<p>Narasumber : Kepala BAPPEDA Tanjung Balai</p> <p>Dari hasil wawancara yang dilakukan, kepala BAPPEDA Tanjung Balai megatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang disajikan harus dengan berpedoman pada standar yang lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Karena transparansi dan akuntabilitas merupakan yang berperan penting dalam kepuasan publik atas pengelolaan keuangan dikantor BAPPEDA ini. Maka hal yang sangat dibutuhkan dalam hal transparansi dan akuntabilitas yaitu kinerja yang baik, ungkap kepala BAPPEDA lagi terutama di bagian kinerja dalam pengelolaan keuangan.</p>

3.	<p>Apa saja kendala atau hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian sistem akuntansi berbasis akrual ?</p>	<p>Narasumber : Staf Bagian Keuangan</p> <p>Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian staf keuangan bahwa kendala yang dihadapi pada saat awal pengimplementasian sistem akuntansi berbasis akrual dan juga masih terjadi sampai sekarang yaitu soal pemahaman. Karena belum bisa full memahami sistem tersebut. Sama seperti yang diungkapkan oleh kepala BAPPEDA bahwa SDM lah yang menjadi kendala pling berpengaruh karena sebagian kecil saja yang memahami teknis sistem tersebut pada tahun-tahun pertama saat itu. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini berkat kerja keras pegawai yang giat mengikuti kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan pemahaman dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dan rasa saling membantu para pegawai di BAPPEDA Tanjung Balai, kami para pegawai dan juga seluruh masyarakat dapat menikmati manfaatnya. Karena laporan keuangan yang diperoleh juga akan lebih baik.</p>
----	--	--

4.	<p>Apa kelebihan yang dirasakan para pegawai saat menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual ?</p>	<p>Narasumber : Staf Bagian Keuangan</p> <p>Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan staf bagian keuangan. Staf bagian keuangan mengatakan akuntansi berbasis akrual lebih dipercaya dan akurat dalam menghasilkan informasi yang akuntabel dan transparan dalam menghasilkan informasi laporan keuangan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Karena akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya penjelasan berbagai macam-macam biaya yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk wajar. dan basis akrual menyediakan informasi penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya.</p>
5.	<p>Apa yang dilakukan BAPPEDA Tanjung Balai untuk mengoptimalkan sistem akuntansi berbasis akrual terkhusus SDM yang dikatakan oleh kepala BAPPEDA dan beberapa pihak lainnya bahwa SDM perlu adanya peningkatan untuk mengoptimalkan sistem tersebut ?</p>	<p>Narasumber : Kepala BAPPEDA Tanjung Balai</p> <p>Dari hasil wawancara yang dilakukan, kepala BAPPEDA Tanjung Balai mengatakan bahwa BAPPEDA sudah mulai melakukan program-program yang akan membantu meningkatkan pemahaman para SDM yang akan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, seperti program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan, Program Administrasi Perkantoran, Program</p>

		<p>Peningkatan Sarana Prasarana dan Disiplin Para Aparatur, serta Program Pelayanan Administrasi. Kepala BAPPEDA mengatakan bahwa program-program tersebut sudah berjalan dari tahun 2015 untuk mengupayakan dan mengoptimalkan penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual di BAPPEDA Tanjung Balai.</p>
6.	<p>Bagaimana melihat pencapaian dari implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual bahwa sistem tersebut sudah optimal dijalankan dan digunakan ?</p>	<p>Narasumber : Staf Bagian Keuangan</p> <p>Seperti yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan staf bagian keuangan bahwa pencapaian dari pengimplementasian dan optimalnya sistem akuntansi berbasis akrual bisa dilihat dari tetap konsistennya BAPPEDA Tanjung Balai dan para pegawinya membuat program kegiatan dan menjalankan program tersebut dari tahun 2015 sampai sekarang, sehingga dalam meningkatkan kualitas pelaporan selama menggunakan sistem akrual tersebut alhamdulillah sampai sekarang manfaatnya sudah sangat dirasakan sampai detik ini.</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Hastia Simanjuntak
NIM : 0502172375
TTL : Sei Kepayang Kiri. 19 Juni 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Bahagia LK V, Kel Keramat Kubah, Kec Sei Tualang Raso,
Tanjung Balai

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 010026 Sei Kepayang Kiri Tahun 2010
2. Tamatan MTS Aw Sei Kepayang Tahun 2013
3. Tamatan SMA Negeri 1 Sei Kepayang Tahun 2016
4. Tamatan S1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI DAN PENGALAMAN KEGIATAN

1. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah (HMJ AKS) FEBI UIN-SU (2019-2021)
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam FEBI UINSU (2017- 2021)
3. Anggota Relawan SUMUT Mengajar (2018-2019)
4. Anggota Aliansi Pemuda Peduli (2018-1019)